

NEWSLETTER

PKSPARLEMEN

KREATIF, ATRAKTIF, SUBSTANTIF

Edisi Maret IV Tahun 2025 No. 59

FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
Kreatif | Atraktif | Substantif



Imbau Pemerintah

Gencarkan Sosialisasi Keselamatan Mudik 2025

Reni Astuti, S.Si., M.PSDM.



Berpolitik Untuk Membangun Bangsa Dan Peradaban

Pengertian politik (*al-siyasah*) dalam fiqh Islam menurut ulama Hanbali, adalah sikap, perilaku dan kebijakan kemasyarakatan yang mendekatkan pada kemaslahatan, sekaligus menjauhkan dari kemafsadahan, rneskipun belum pernah ditentukan oleh Rasulullah SAW

Berpolitik kata Ibnu Khaldun, ilmuwan politik Islam, adalah sarana menuju keteraturan dan sebuah cara menuju peradaban. Dengan demikian, politik pada dasarnya merupakan laku lahiriyah manusia yang menjadi sunnatullah eksistensinya di dunia. Aristoteles menyebut manusia sebagai "zoon politicon" atau makhluk politik. Dua karya

magnum opus, Republic-nya Plato dan Politics-nya Aristoteles, menjelaskan bahwa sejatinya politik itu agung dan mulia yakni sebagai wahana membangun masyarakat utama. Sebuah masyarakat berkeadaban yang terwujud dalam tatanan sosial yang berlandaskan pada hukum, norma, dan aturan sehingga tercipta keadilan, kesejahteraan,

dan kemaslahatan umum. Bagi Plato, politik adalah jalan mencapai apa yang disebut a perfect society; bagi Aristoteles, politik adalah cara meraih apa yang disebut the best possible system that could be reached (Hacker 1961).

Dalam ajaran Islam, manusia adalah makhluk Allah yang dikirim ke bumi untuk menjadi khalifah-Nya yang

memban tugas isti'maru la-ardh, memakmurkan bumi dengan syariat-Nya. Kalau khalifah kita artikan sebagai kekuasaan, maka untuk mencapai kekuasaan itu politik tidak mungkin dihindikan. Artinya manusia adalah satu-satunya makhluk yang berpolitik, karena Allah tidak mengirim atau membebaskan amanah sebagai khalifah-Nya

kepada selain manusia.

Orang yang tidak dapat hidup berkelompok dan dengan modal kebebasannya tidak memiliki kebutuhan politik sama dengan binatang. Maka sifat politik adalah kekhususan manusia. Setiap manusia adalah rajulun siyasi (politisi). Manusia yang tidak mengerti politik adalah bukan lagi manusia dalam arti yang sesungguhnya.

Politik dalam Islam disebut "siyasah" yang bermakna mengatur urusan umat, yang dilaksanakan oleh negara (pemerintah) maupun umat. Dalam al-qur'an tidak tertulis secara tekstual mengenai kata siyasah. Namun dalam QS. Annisa: 58-59 membahas tentang menyerahkan amanat dan penghormatan kepada pemimpin. Arti ayat tersebut:

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat."

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.

Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang

sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (Q.S An-nisa: 58-59)

Dua ayat dalam Q.S An-nisa di atas adalah dasar yang telah diturunkan oleh Allah Swt dengan wahyu sebagai pokok pertama didalam mendirikan sesuatu kekuasaan, atau suatu pemerintahan, sekaligus untuk menaati pemimpin yang memimpin umat.

Yang pertama adalah isyarat untuk menyerahkan amanat kepada ahlinya. Tegasnya, hendaklah seluruh pelaksana pemerintahan, seluruh aparat pemerintah diberikan kepada orang yang bisa memegang amanat, orang yang ahli. Hak pertama ialah pada rakyat, atau dalam istilah agama, pada umat pilihan utama puncak pimpinan Negara, yang juga bisa disebut dengan khalifah, sultan dan presiden.

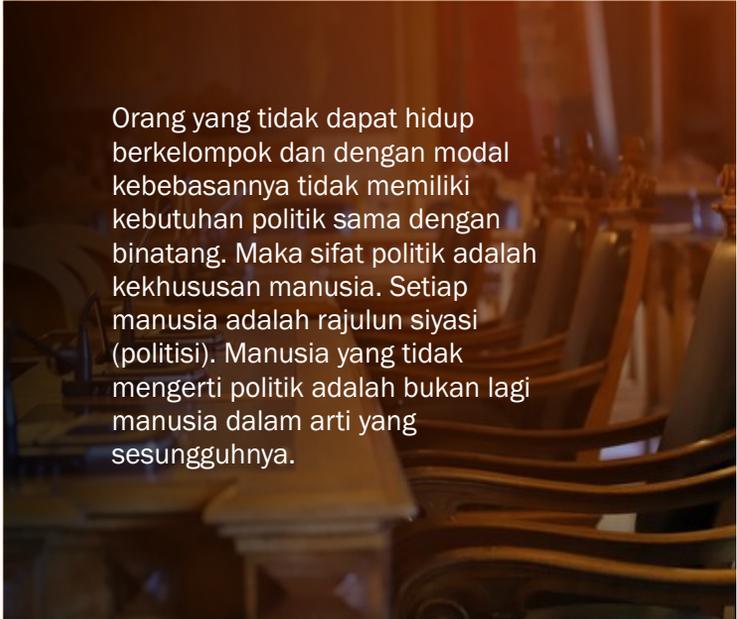
Yang kedua ialah perintah untuk menaati Allah Swt. Rasul dan Ulil amri (pemimpin), dengan syariat tidak bertentangan dengan hukum-hukum Allah Swt yang terdapat dalam al-qur'an dan al-hadis yang menjadi petunjuk hidup umat Islam.

Pengertian politik (al-siyasah) dalam fiqh Islam menurut ulama Hanbali, adalah sikap, perilaku dan kebijakan kema-

sarakatan yang mendekatkan pada kemaslahatan, sekaligus menjauhkan dari kemafsadahan, meskipun belum pernah ditentukan oleh Rasulullah SAW. Ulama Hanafiyah memberikan pengertian lain, yaitu mendorong kemaslahatan makhluk dengan memberikan petunjuk dan jalan yang menyelamatkan mereka di dunia dan akhirat. Bagi para Nabi terhadap kaumnya, menurut pendapat ini, tugas itu meliputi keselamatan batin dan lahir. Bagi para ulama pewaris Nabi, tugas itu hanya meliputi urusan lahiriyah saja.

edangkan menurut ulama Syafi'iyah mengatakan, politik harus sesuai dengan syariat Islam, yaitu setiap upaya, sikap dan kebijakan untuk mencapai tujuan umum prinsip syariat. Tujuan itu ialah: (1) Memelihara, mengembangkan dan mengamalkan agama Islam. (2) Memelihara rasio dan mengembangkan cakrawalanya untuk kepentingan umat. (3) Memelihara jiwa raga dari bahaya dan memenuhi kebutuhan hidupnya, baik yang primer, sekunder mau pun suplementer. (4) Memelihara harta kekayaan dengan pengembangan usaha komoditasnya dan menggunakannya tanpa melampaui batas maksimal dan mengurangi batas minimal. (5) Memelihara keturunan dengan memenuhi kebutuhan fisik mau pun rohani.

Dari pengertian itu, menurut KH. Sahal Mahfudh (2004),



Orang yang tidak dapat hidup berkelompok dan dengan modal kebebasannya tidak memiliki kebutuhan politik sama dengan binatang. Maka sifat politik adalah kekhususan manusia. Setiap manusia adalah rajulun siyasi (politisi). Manusia yang tidak mengerti politik adalah bukan lagi manusia dalam arti yang sesungguhnya.

Islam memahami politik bukan hanya soal yang berurusan dengan pemerintahan saja, terbatas pada politik struktural formal belaka, namun mencakup juga kulturisasi politik secara luas. Politik bukan berarti perjuangan menduduki posisi eksekutif, legislatif mau pun yudikatif. Lebih dari itu, ia meliputi serangkaian kegiatan yang menyangkut kemaslahatan umat dalam kehidupan jasmani mau

pun rohani, dalam hubungan kemasarakatan secara umum dan hubungan masyarakat sipil dengan lembaga kekuasaan. Bangunan politik semacam ini, harus didasarkan pada kaidah fiqh yang berbunyi, tasharruf al-imam manuthun bi al-mashlahah (kebijakan pemimpin harus berorientasi pada kemaslahatan rakyat atau masyarakat)

Dalam kitab-kitab klasik ulama terdahulu kita menemukan

referensi yang sangat kuat dan memadai tentang pentingnya dan betapa strategisnya peran politik (bernegara) dalam Islam. Kita bisa membaca misalnya "Muqaddimah" karya Ibn Khaldun atau "Al-ahkam As-sulthaniyyah" karya Imam Al-Mawardi serta banyak kitab-kitab politik lainnya yang menjadi rujukan bagaimana Islam mengatur politik dan ketatanegaraan.



POSKO MUDIK PKS 2025

Selamat Mudik

Lebaran 1446 H

**Hati-hati di Jalan
Semoga Lancar dan
Selamat Sampai
Tujuan**

Dr. H. Jazuli Juwaini, M.A.

Ketua Fraksi PKS DPR RI



Istirahat
Nyaman



Tempat
Sholat



Toilet
Gratis



Charging HP
Gratis



Layanan
untuk Anak



Parkir
Aman



Makanan Minum
Gratis



Bantuan
Kedarifatan



Info PKS



Ruang
Laktasi





Reni Astuti Imbau Pemerintah Gencarkan Sosialisasi Keselamatan Mudik Lebaran 2025

Karawang (17/03) — Anggota Komisi V DPR RI Reni Astuti mendorong pemerintah untuk melakukan sosialisasi secara masif kepada masyarakat calon pemudik, sehingga mudik lebaran tahun ini bisa berjalan lebih lancar, mengutamakan kenyamanan dan keselamatan selama perjalanan.

Demikian dikatakan Reni usai mengikuti kunjungan kerja spesifik Komisi V DPR RI dalam rangka meninjau kesiapan ruas Tol Jakarta-Cikampek menghadapi arus mudik lebaran 2025 di Kantor Jasa Marga Gerbang Pintu Tol Cikampek Utama, Karawang, Jawa Barat, Kamis (13/3/2025).

"Terkait peningkatan

"Terkait peningkatan transaksi di pintu tol, harus dipastikan sensitivitas layar tap kartu e-toll di pintu gerbang agar mempercepat transaksi sehingga meminimalisir kemacetan akibat antrian di pintu tol.

RENI ASTUTI, S.Si., M.PSDM.

Anggota Komisi V DPR RI

transaksi di pintu tol, harus dipastikan sensitivitas layar tap kartu e-toll di pintu gerbang agar mempercepat transaksi sehingga meminimalisir kemacetan akibat antrian di pintu tol. Lalu pastikan saldo e-toll terisi cukup jangan sampai pemudik terlalu lama berhenti di gerbang tol karena saldonya tidak cukup," terang Reni.

Politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini juga mendorong Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) agar di rest area disiapkan semacam counter pengisian untuk top up e-toll didukung fasilitas QRIS, M-Banking yang disertai sosialisasi sehingga bisa dilakukan dengan cepat. Penumpukan kendaraan di rest area juga perlu dimitigasi sejak dini dan dicarikan solusinya.

"Standar Pelayanan Minimal (SPM) jalan tol itu salah satunya memastikan tidak ada satupun lubang di sepanjang jalan Tol. H-10 arus mudik nanti

diharapkan tidak ada lagi jalan berlubang, jalan bergelombang yang membahayakan, tidak ada angkutan barang (selain sembo dan BBM) yang melintas di jalan Tol, tidak ada lagi perbaikan jalan saat masa arus mudik berlangsung," tandas Politisi PKS asal Dapil Jawa Timur I ini.

Reni mengimbau kepada para pemudik untuk menjaga kesehatan terutama para pengemudi (driver), sehingga jika alami kelelahan dapat beristirahat di rest area. Pastikan pula kelayakan kendaraan, kecukupan bahan bakar selama perjalanan, ikuti aturan yang berlaku, tidak parkir sembarangan di bahu jalan Tol karena membahayakan pengendara lainnya.

"Kepada masyarakat Indonesia saya mengucapkan selamat mudik lebaran semoga aman, lancar dan bahagia bertemu keluarga," tutupnya.



Mudik Lebaran 2025: Keamanan dan Kenyamanan Jadi Prioritas Utama

Mataram (24/3) — Mudik Lebaran 1446H/2025M menjadi perhatian utama pemerintah dalam mempersiapkan segala aspek yang dibutuhkan untuk memastikan kenyamanan dan keamanan bagi pemudik.

Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKS Dapil NTB II, Haji Abdul Hadi, mengungkapkan bahwa persiapan mudik Lebaran telah mulai dibahas oleh berbagai pihak untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat yang akan mudik.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menjadi koordinator utama dalam pelaksanaan mudik 2025, bekerja sama dengan Kepolisian, Kementerian Pekerjaan Umum (PU), BNPB, serta kementerian lainnya.

"Kami di Komisi V juga terlibat dalam memantau dan mengevaluasi jalannya mudik ini," ujar Haji Abdul Hadi saat ditemui di Mataram, Minggu (23/3/2025).

Diprediksi, sekitar 140 juta orang akan melakukan mudik tahun ini, yang tentu saja membutuhkan sarana dan prasarana infrastruktur yang aman dan nyaman. Abdul Hadi menekankan pentingnya Kementerian Pekerjaan Umum untuk memastikan jalan dan jembatan yang telah dibangun siap digunakan. Bahkan, untuk proyek yang masih dalam tahap pembangunan,

sistem buka-tutup akan diterapkan untuk mendukung kelancaran arus mudik.

Selain infrastruktur, Kemenhub juga diminta untuk memastikan bahwa tarif transportasi seperti bus, kapal laut, pesawat, dan kereta api, tetap terjangkau dan tidak memberatkan pemudik.

"Kami menekankan agar Kemenhub memantau harga tiket secara ketat. Jika ada kenaikan tarif, seharusnya tetap dalam batas yang wajar dan sesuai dengan regulasi yang ada," tambahnya.

Ketersediaan moda transportasi yang memadai juga menjadi perhatian utama. Diharapkan tidak hanya ketersediaan armada, tetapi juga pelayan-

an yang baik selama perjalanan agar para pemudik dapat menikmati perjalanan dengan aman dan nyaman.

Selain itu, Abdul Hadi juga menyoroti pentingnya pengawasan dalam hal keamanan berkendara. Kepolisian, khususnya satuan lalu lintas, diharapkan dapat melakukan pengawasan yang intensif untuk memastikan situasi mudik berjalan dengan lancar.

"Kami berhasil menurunkan tingkat kecelakaan saat Natal dan Tahun Baru (Nataru) kemarin, dan kami berharap angka kecelakaan selama mudik Lebaran bisa terus ditekan," katanya.

Demi kenyamanan, keamanan, dan kebahagiaan pemudik yang ingin bertemu keluarga di kampung halaman, Haji Abdul Hadi mengingatkan agar semua pihak terkait terus bekerja sama untuk menciptakan suasana mudik yang aman dan nyaman.

"Kami menekankan agar Kemenhub memantau harga tiket secara ketat. Jika ada kenaikan tarif, seharusnya tetap dalam batas yang wajar dan sesuai dengan regulasi yang ada,

ABDUL HADI, S.E., M.M.
Anggota Komisi V DPR RI



image istimewa

Kebijakan Pemerintah Diskon Tarif Pesawat dan Tol, DPR: Pengumuman dan Sosialisasinya Terlambat

Anggota Komisi V DPR RI, Yanuar Arif Wibowo mengatakan, pengumuman diskon tarif pesawat 10 persen dan tarif tol sebesar 20 persen yang dilakukan pemerintah dalam menyambut mudik lebaran, terlambat.

Salahnya informasi dilakukan di bulan Ramadan, yang mana kebanyakan masyarakat sudah membeli tiket dari jauh-jauh hari sebelum Ramadan tiba. Selain itu, politisi PKS ini menilai, pengambilan keputusan dan sosialisasi mengenai diskon tersebut juga dilakukan dalam waktu yang tidak tepat dan mepet.

"Tradisi Idul Fitri dan Nataru itu sifatnya tahunan. Seharusnya mitigasinya dilakukan sebelum pelaksanaan ibadah puasa. Seperti pembelian tiket pesawat, kereta api itu kan 45 hari sebelum lebaran sudah dibuka. Jadi, kalau diumumkan di bulan puasa sudah terlambat, karena tiket sudah dibeli sebelum pemerintah mengumumkan diskon tersebut," ujar Yanuar dalam diskusi dialektika demokrasi 'Kebijakan Diskon Lebaran: Sinergi antara Pemerintah, Maskapai, dan Pengelola Jalan Tol' di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Selasa (18/3/2025).

Menurutnya, tradisi tahunan itu baru hangat dibicarakan setiap menjelang

hari raya Idul Fitri, sehingga mitigasinya juga dilakukan di waktu yang mepet, pendek. Termasuk layanan mudik gratis yang dilakukan oleh BUMN maupun swasta. Akibatnya banyak kursi yang kosong karena masyarakat sudah beli tiket jauh-jauh hari sebelum puasa.

"Pendaftaran mudik gratis tidak dilakukan satu pintu, makanya banyak juga anggota masyarakat yang daftar lebih dari satu tempat. Hal-hal yang rutin ini seharusnya bisa dilakukan lebih efektif lagi di kemudian hari, agar tidak tumpang-tindih," tegasnya.

Lebih lanjut Yanuar mengungkapkan, jalan-jalan setelah keluar pintu tol juga masih banyak yang rusak. Bahkan di tolnya sendiri juga keadaan jalannya tidak bagus. Hal itu akan menimbulkan kemacetan lalu lintas hingga terjadinya kecelakaan, baik di tol maupun di luar jalan tol.

"Untuk tiket pesawat juga sama. Selain terlambat, meski sudah disubsidi 6 persen dan

Kebijakan Pemerintah Diskon Tarif Pesawat dan Tol, DPR: Pengumuman dan Sosialisasinya Terlambat

« SEBELUMNYA

airporttax 5 persen, yang kata Menkeu RI Sri Mulyani disubsidi hingga Rp 260 miliar, tapi harga tiket sama saja dengan hari-hari biasa. Mestinya di-publish ke publik, baik harga sebelum diskon dan setelah diskon. Juga masih ada biaya airporttax dan lain-lain," tandasnya.

Pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi VI DPR RI F-PKS, Amin AK yang hadir

secara virtual mengatakan, kebijakan diskon tersebut harus ada kolaborasi pihak terkait agar berjalan sampai pada tahap implementasi di lapangan dengan baik.

"Sebab sesuatu yang baik di level atas belum tentu terlaksana dengan baik di lapangan. Karena itu, maskapai, pemerintah dan pengelola jalan tol harus kompak agar bisa memperlancar lalu lintas arus mudik dan arus balik. Terutama

kenyamanan, ketepatan waktu, dan keamanan," tuturnya.

Selain itu, untuk mengurangi beban ekonomi masyarakat, sehingga harus pula disosialisasikan dengan masif dengan melibatkan berbagai media agar dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat.

"Selanjutnya komunikasi yang baik antara stakeholder dan pengelola jalan tol untuk memanfaatkan teknologi canggih guna memantau terjadinya kepadatan kendaraan, kecelakaan, perbaikan jalan dan lainnya selama di jalan tol," pungkas Amin.

Praktisi media Eko Cahyono berharap, sosialisasi kebijakan itu dilakukan jauh-jauh hari. Pemerintah juga diharapkan tidak hanya menerapkan kebijakan ini pada keberangkatan mudik saja, tetapi juga pada saat arus balik mudik.

Hal itu agar benar-benar bermanfaat bagi masyarakat, baik saat pulang ke kampung halaman hingga kembali ke tempat asal para pemudik.

"Jangan sampai kebijakan yang populis ini hanya gimik atau pencitraan saja. Padahal jumlah pemudik yang besar akan menggerakkan perekonomian di daerah. Seharusnya tunjuk satu juru bicara agar kebijakan itu tidak simpang siur," lugas Eko. (Asp)



"Tradisi Idul Fitri dan Nataru itu sifatnya tahunan. Seharusnya mitigasinya dilakukan sebelum pelaksanaan ibadah puasa. Seperti pembelian tiket pesawat, kereta api itu kan 45 hari sebelum lebaran sudah dibuka. Jadi, kalau diumumkan di bulan puasa sudah terlambat, karena tiket sudah dibeli sebelum pemerintah mengumumkan diskon tersebut,"

H. YANUAR ARIF BOWO, S.H.
Anggota Komisi V DPR RI



Image istimewa

PKS Minta Pemerintah Jamin Mudik Aman, Nyaman dan Murah

PREDIKSI PEMUDIK 2025
146,48
 JUTA ORANG
 SETARA 5% TOTAL POPULASI INDONESIA

PKS TV DPR RI | PKS DPR RI | @fraksipkdprri | @fkskdprri | @fraksipkdprri

Sumber: Berita Fraksi PKS I Grafik Hari

MUDIK AMAN, KECELAKAAN MASIH MENJADI ANCAMAN

● ANKSA KECELAKAAN

2023	3.561	2024	3.286	PERUBAHAN	-8%
------	-------	------	-------	-----------	-----

REKOR KORBAN LUKA BERAT

2023	444	2024	523	PAK	33%
------	-----	------	-----	-----	-----

STRATEGI SOLUSI

- PERBAIKAN DAN PERMUDAHAN JALAN
- Identifikasi dan perbaikan jalur rawan kecelakaan
- Penguatan sistem informasi untuk pemudik
- PROGRAM MUDIK GRATIS
- 10 TRUK
- 21.536
- 300
- MALAYSI BUKA CUKUP
- 5% TITIK PERHATIAN MUDIK

PKS TV DPR RI | PKS DPR RI | @fraksipkdprri | @fkskdprri | @fraksipkdprri

Sumber: Berita Fraksi PKS I Grafik Hari

BENCANA HIDROMETERELOGI

POTENSI HUJAN LEBAT, BANJIR, DAN LONGSOR SELAMA MUDIK MUDIK 2025 DI BEBERAPA JALUR UTAMA SEPERTI JALUR PANTURA, PANSELA, SERTA JALUR UTAMA SUMATERA DAN KALIMANTAN.

STRATEGI SOLUSI

- POSKO TANGPAK DARURAT
- ALAT BERAT DI TITIK RAWAN

DIPERLUKAN KOORDINASI ANTARA KEMENHUB, KEMENTERIAN PIR, BMKG, DAN PEMERINTAH DAERAH.

PKS TV DPR RI | PKS DPR RI | @fraksipkdprri | @fkskdprri | @fraksipkdprri

Sumber: Berita Fraksi PKS I Grafik Hari

MUDIK NYAMAN PERJALANAN TAK JADI BEBAN

KEMACETAN DI JALUR TOL DAN NON-TOL

- Jalur arteri kian padat, terutama di titik rawan seperti Pantura, Jalur Tengah Jawa, hingga Lintas Sumatera
- Rest Area overcapacity

STRATEGI SOLUSI

- Penambahan rest area dan buffer zone.
- Rekayasa Lalu Lintas :

PKS TV DPR RI | PKS DPR RI | @fraksipkdprri | @fkskdprri | @fraksipkdprri

Sumber: Berita Fraksi PKS I Grafik Hari

KETERSEDIAAN ANGKUTAN UMUM

- Kapasitas kereta api dan pesawat sebagai moda transportasi andalan sangat terbatas

STRATEGI SOLUSI

- Penambahan frekuensi kereta api dan Pesawat.
- Peningkatan integrasi moda transportasi
- Peningkatan Fasilitas bandara dan stasiun
- Meningkatkan On Time Performance (OTP)

PKS TV DPR RI | PKS DPR RI | @fraksipkdprri | @fkskdprri | @fraksipkdprri

Sumber: Berita Fraksi PKS DPR RI | Grafik Hari

MUDIK MURAH TARIF TRANSPORTASI TERJANGKAU

TARIF TOL TERUS MENINGKAT

● PERMISION DISKON TARIF TOL

KETERJANGKAUAN TIKET KENDARAAN UMUM

● PERMISION DISKON TARIF DIPIN TIKET PESAWAT

PKS TV DPR RI | PKS DPR RI | @fraksipkdprri | @fkskdprri | @fraksipkdprri

Sumber: Berita Fraksi PKS I Grafik Hari



”

Pemerintah perlu memahami saat ini,
mudik bukan sekadar perjalanan,
tetapi merupakan hak bagi warga negara
untuk bisa bertemu keluarga dengan
**aman, nyaman, dan tanpa biaya
yang memberatkan.**



H. Abdul Hadi, S.E., M.M
Anggota Komisi V DPR RI

▶ [PKS TV DPR RI](#) | [f](#) [FPKS DPR RI](#) | [i](#) [fraksipksdpri](#) | [x](#) [@fpksdpri](#) | [t](#) [@fraksipksdpri](#)

sumber: Berita FPKS DPR RI | Grafis: Heri



image istimewa

Gelar Acara Buka Puasa Bersama, Fraksi PKS Apresiasi Wartawan dan Peduli Anak Yatim

Jakarta (18/03) — Dalam suasana penuh kehangatan dan kebersamaan, Fraksi PKS DPR RI menggelar Silaturahmi dan Buka Puasa Bersama yang dihadiri oleh Ketua Majelis Syuro PKS Dr. Salim Segaf Aljufri, Presiden PKS, Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini beserta seluruh anggota Fraksi PKS pada Selasa (18/03).

Acara ini sekaligus menjadi momentum untuk mengapresiasi awak media yang selama ini menjadi mitra strategis Fraksi PKS serta penyerahan santunan kepada anak yatim sebagai bentuk kepedulian sosial.

Dalam sambutannya, Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini menegaskan pentingnya hubungan erat antara Fraksi PKS dengan para wartawan yang selama ini telah berperan besar dalam menyampaikan informasi perjuangan Fraksi PKS kepada masyarakat.

"Terima kasih kepada para wartawan yang telah membantu mengangkat dan mempublikasikan kegiatan kami di fraksi. Kami ingin menegaskan bahwa Fraksi PKS akan selalu dekat dengan wartawan. Tidak ada jarak maupun gap antara anggota Fraksi PKS dengan para wartawan," ujar Jazuli.

Lebih lanjut, ia juga menegaskan komitmen Fraksi PKS dalam berkoalisi untuk mengawal kebijakan yang

berpihak pada rakyat. "Kita berkoalisi, maka ikut bertanggung jawab atas semua langkah dan keputusan. Oleh karena itu, kami selalu memberikan usulan apabila ada kebijakan yang tidak tepat," tambahnya.

Presiden PKS Ahmad Syaikhul dalam Pleno Fraksi menekankan pentingnya memaknai ramadhan sebagai momentum untuk mengkokohkan kesalehan setiap anggota dewan baik kesalehan pribadi, keluarga, sosial maupun kesalehan politik.

Maknanya, menurut Ahmad Syaikhul, dengan meningkatkan kualitas iman dan takwa, memperbaiki keluarga, memupuk kepedulian sosial dengan berbagi, serta membangun sensitivitas dan empati terhadap permasalahan rakyat lalu memperjuangkan secara sungguh-sungguh melalui legislasi, anggaran, pengawasan dan advokasi.

Sementara itu, Ketua

Gelar Acara Buka Puasa Bersama, Fraksi PKS Apresiasi Wartawan dan Peduli Anak Yatim

« SEBELUMNYA

Majelis Syuro PKS Dr. Salim Segaf Aljufri dalam arahnya menyampaikan pesan inspiratif tentang makna puasa dalam membentuk karakter dan solidaritas sosial.

"Alhamdulillah kita bisa mengadakan kegiatan buka puasa bersama ini. Puasa punya makna khusus. Kata 'kuteba' dalam Al-Qur'an memiliki makna yang jauh lebih kuat, yakni sesuatu yang tidak dihendaki tetapi diwajibkan

agar kita meraih derajat ketakwaan," ungkapnya.

Ia juga menyoroti bagaimana puasa dapat menjadi sarana untuk membangun kepedulian dan kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat. "Kita bertemu dalam acara ini merupakan bukti luar biasa bahwa puasa membangun solidaritas dan kebersamaan antara seluruh bangsa," ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengajak hadirin untuk lebih peduli terhadap sesama, terutama sesama dan masyarakat sekitar. "Mem-

bawakan makan kepada tetangga yang membutuhkan) jauh lebih dicintai oleh Rasulullah daripada berikaf di masjid selama sebulan," tambahnya.

Sebagai bentuk penghargaan terhadap insan pengabdian, Fraksi PKS dalam kegiatan ini juga memberikan apresiasi kepada wartawan yang selama ini telah menjadi mitra dalam menyampaikan informasi yang objektif dan konstruktif.

Acara lalu ditutup dengan penyerahan santunan kepada anak yatim sebagai wujud nyata kepedulian sosial. Kegiatan ini mencerminkan semangat kebersamaan yang diusung Fraksi PKS dalam membangun bangsa yang lebih peduli dan berempati terhadap sesama.



image istimewa



"Terima kasih kepada para wartawan yang telah membantu mengangkat dan mempublikasikan kegiatan kami di fraksi. Kami ingin menegaskan bahwa Fraksi PKS akan selalu dekat dengan wartawan. Tidak ada jarak maupun gap antara anggota Fraksi PKS dengan para wartawan,"

Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA

Ketua Fraksi PKS DPR RI



Kegiatan Dibeliin Baju PKS dihadiri 250 Yatim dan Dhuafa

Depok (22/3) — Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini, mendampingi Presiden PKS Ahamd Syaikh dan Ketua Majelis Syura PKS Dr. Salim dalam kegiatan Dibeliin PKS Baju Baru untuk yatim dan dhuafa di Kota Depok, Jawa Barat, Sabtu (22/3/2025). Kegiatan yang diikuti 250 anak yatim dan dhuafa ini juga dihadiri oleh Bendahara Umum DPP PKS Mahfudz Abdurahman, Anggota DPR RI Fraksi PKS Muhammad Kholid dan beberapa anggota dewan DPRD Kota Depok.



image istimewa

Bukti Peduli dan Berbagi, PKS Gelar Program 'Dibeliin Baju Baru' untuk Ratusan Anak Yatim dan Dhuafa

Depok (22/03) – Dalam rangkaian program Ramadhan, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar program bertajuk Dibeliin PKS Baju Baru untuk Anak Yatim dan Dhuafa. Kegiatan yang dilaksanakan pada Sabtu (22/3) di Rabbani Depok, Jawa Barat, ini diikuti oleh 250 anak yatim dan dhuafa yang mendapatkan kesempatan memilih langsung baju Lebaran.

Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua Majelis Syuro PKS Dr. Salim Segaf Aljufri, Presiden PKS Ahmad Syaikh, serta Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini yang turun langsung mendampingi para anak yatim untuk memilih baju lebaran mereka.

Ketua Majelis Syuro PKS Dr. Salim Segaf Aljufri menyampaikan bahwa program ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Ramadhan PKS yang dilaksanakan di berbagai daerah.

“Di hari yang penuh berkah ini, kita bisa bersama-sama menemani anak-anak yatim dan dhuafa memilih pakaian untuk menyambut Lebaran. Ini adalah bagian dari komitmen PKS untuk terus berbagi kebahagiaan, tidak hanya di tingkat pusat, tetapi juga hingga ke daerah,” ujarnya.

Presiden PKS Ahmad Syaikh menambahkan bahwa membahagiakan anak yatim merupakan salah satu fokus utama program sosial PKS di bulan Ramadhan.

“Kami bersyukur bisa berbagi kebahagiaan hari ini. Ini merupakan agenda pertama dalam program pembagian langsung baju Lebaran untuk anak-anak yatim dan dhuafa. Kami berharap program ini dapat memberikan manfaat dan kebahagiaan bagi mereka,” kata Ahmad Syaikh.

“Di hari yang penuh berkah ini, kita bisa bersama-sama menemani anak-anak yatim dan dhuafa memilih pakaian untuk menyambut Lebaran. Ini adalah bagian dari komitmen PKS untuk terus berbagi kebahagiaan, tidak hanya di tingkat pusat, tetapi juga hingga ke daerah,”

Dr. SALIM

Ketua Majelis Syuro PKS

Dalam kegiatan hari ini turut hadir anggota Fraksi PKS DPR RI, di antaranya Mahfudz Abdurrahman, M. Kholid, Ismail Bachtiar, dan Yanuar Arif Wibowo, serta anggota Fraksi PKS DPRD Provinsi Jawa Barat dan DPRD Kota Depok.

Program ini menjadi salah satu bentuk kepedulian PKS terhadap masyarakat yang membutuhkan, terutama anak-anak yatim dan dhuafa, agar mereka dapat merasakan kegembiraan menyambut Hari Raya Idul fitri.

PKS terus berkomitmen untuk menghadirkan program-program sosial yang bermanfaat bagi masyarakat luas, khususnya di momen-momen penting seperti bulan Ramadhan.



image istimewa

Das'ad Latif: PKS Harus Menjadi Pelopor Islam yang Rahmatan Lil Alamin

Jakarta – Ustadz Das'ad Latif memberikan tausiyah dalam acara Peringatan Nuzul Quran yang diselenggarakan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada Sabtu (22/3/2025). Dalam ceramahnya, ia menegaskan pentingnya menjaga persatuan dan moralitas bangsa melalui ajaran Islam yang rahmatan lil alamin.

"Ketika kumpul seperti ini, bershalawatlah bersama, memperkuat ukhuwah. Saya meminta semua bershalawat karena ingin menghilangkan fitnah kepada PKS, seolah PKS tidak pernah bershalawat. Ini bukti bahwa itu semua fitnah belaka," ujarnya di hadapan para hadirin.

Ia menekankan bahwa dakwah seperti ini harus terus dikampanyekan agar masyarakat

"Ketika kumpul seperti ini, bershalawatlah bersama, memperkuat ukhuwah. Saya meminta semua bershalawat karena ingin menghilangkan fitnah kepada PKS, seolah PKS tidak pernah bershalawat. Ini bukti bahwa itu semua fitnah belaka,"

Ustadz Das'ad Latif

Ulama

kat memahami bahwa PKS membawa nilai-nilai Islam yang damai dan membawa rahmat bagi semua.

"PKS ini saya takut ceramah, pimpinannya ustaz semua," candaunya yang disambut tawa para jamaah.

Dalam tausiyahnya, Das'ad Latif mengisahkan hadits dari Shahih Bukhari tentang tiga pemuda yang terjebak di dalam gua dan berdoa dengan wasilah kebaikan mereka. Ia menegaskan bahwa Allah selalu mengabulkan doa, terutama doa yang dilandasi dengan amal saleh, salah satunya adalah berbakti kepada orang tua (birrul walidain).

"Allah berjanji, doa pasti dikabulkan, salah satunya adalah doa karena berbuat baik kepada orang tua. Ini penting untuk selalu kita ingat," katanya.

Selain itu, ia mengingatkan PKS agar terus berperan

dalam menjaga moralitas bangsa dan menanamkan pendidikan Pancasila.

"PKS punya peran menjaga moralitas bangsa, saya titipkan penguatan pendidikan Pancasila," pesannya.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga amanah dan menghindari sifat munafik.

"Memelihara amalan itu penting. Orang yang mengkhianati amanah namanya munafik, tempatnya di kerak neraka," tegasnya.

Menutup tausiyahnya, Das'ad Latif mengajak jamaah untuk memanfaatkan sepuluh malam terakhir Ramadan dengan memperbanyak doa, terutama untuk kebaikan orang tua, menghindari maksiat, dan menjaga amal ibadah.

"Rugi orang yang di sepuluh malam terakhir tidak memanfaatkannya untuk berdoa dan berbuat kebaikan," pungkasnya.



image istimewa

Presiden PKS Ajak Masyarakat Perkuat Nilai-nilai Religius di Momen Nuzulul Quran

Jakarta (22/03) — Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Syaikhul, mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kedekatan dengan Al-Qur'an serta mengejar keutamaan malam Lailatul Qadar dalam sepuluh malam terakhir Ramadan.

Hal ini disampaikan dalam acara Peringatan Nuzulul Quran yang digelar di Kantor Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) PKS, Sabtu (22/3/2025).

"Di momen Nuzulul Quran ini, mari kita bersama-sama kejar malam Lailatul Qadar yang ada di sepuluh malam terakhir

"Di momen Nuzulul Quran ini, mari kita bersama-sama kejar malam Lailatul Qadar yang ada di sepuluh malam terakhir ini. Ini menjadi harapan, obsesi, dan keinginan besar PKS untuk terus berusaha mencetak kader serta membangun masyarakat yang berpegang teguh pada nilai-nilai religius sesuai visi partai, yaitu mewujudkan Islam rahmatan lil alamin,"

H. AHMAD SYAIKHU

Presiden PKS

ini. Ini menjadi harapan, obsesi, dan keinginan besar PKS untuk terus berusaha mencetak kader serta membangun masyarakat yang berpegang teguh pada nilai-nilai religius sesuai visi partai, yaitu mewujudkan Islam rahmatan lil alamin," ujar Syaikhul.

Menurutnya, tidak ada cara lain untuk mencapai visi tersebut selain dengan mendekatkan diri kepada Al-Qur'an dan mengamalkan ajarannya dalam kehidupan sehari-hari.

"Harapan ini terus kami perjuangkan agar ajaran Islam rahmatan lil alamin dapat tertanam dalam masyarakat. Dengan begitu, nilai-nilai Al-Qur'an bisa benar-benar hidup

dalam kehidupan sehari-hari," tambahnya.

Lebih lanjut, Syaikhul menegaskan bahwa PKS ingin mencetak generasi masa depan yang menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman utama, sehingga dapat membangun Indonesia yang lebih baik berdasarkan nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin.

Acara peringatan Nuzulul Quran ini dihadiri oleh para kader dan simpatisan PKS, masyarakat, ulama, serta dai kondang ustaz Das'ad Latif yang turut menggaungkan pentingnya Al-Qur'an sebagai landasan dalam membangun bangsa yang berkeadilan dan sejahtera.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

Kreatif Atraktif Substantif



Dr. H. Jazuli Juwaini, M.A.
Ketua Fraksi PKS DPR RI



SOSIAL MEDIA
Fraksi PKS DPR RI



Hj. Ledia Hanifa A., S.Si., M.Psi.T.
Sekretaris Fraksi PKS DPR RI



Ahmad Heryawan: Tantangan Pengaturan Penyiaran Multiplatform dalam Perubahan UU Penyiaran

Jakarta (16/03) — Wakil Ketua Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS, Ahmad Heryawan mengungkapkan bahwa beberapa tantangan dalam pengaturan penyiaran multiplatform dalam perubahan UU Penyiaran yaitu pertama, penyiaran konvensional (TV & radio) tunduk pada regulasi ketat dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

Sementara, imbuhnya, layanan Over-the-Top (OTT) dan platform digital belum memiliki pengawasan sebanding.

"Kedua, konten digital sering kali lolos dari sensor dan tidak memiliki klasifikasi yang jelas; ketiga, pendapatan iklan lebih banyak beralih ke platform digital seperti YouTube dan Netflix, sehingga menurunkan daya saing industri penyiaran nasional," sebut Aher.

Keempat, lanjutnya, tidak adanya mekanisme kerja sama yang jelas antara penyiaran konvensional dan platform digital.

"kelima, kurangnya pengawasan terhadap konten ber

bahaya di platform digital, seperti hoaks, ujaran kebencian, dan eksploitasi anak," ungkapnya.

Keenam, imbuhnya, algoritma rekomendasi di platform digital dapat memperkuat disinformasi dan mengarah pada polarisasi publik.

"Tantangan dalam pengaturan penyiaran multiplatform dalam perubahan UU Penyiaran yaitu adanya ketimpangan regulasi, bagaimana keberlanjutan industri penyiaran lokal, serta bagaimana perlindungan konsumen dan keamanan digital," ungkap Wakil Ketua Majelis Syuro DPP PKS ini.

Menurut Anggota F-PKS DPR RI Periode 2024-2029 daerah pemilihan Jawa Barat 2 ini beberapa rekomendasi kebijakan diperlukan dalam revisi UU Penyiaran yaitu memperluas kewenangan KPI untuk mengawasi konten digital dan layanan OTT, termasuk sensor dan klasifikasi konten; Mengadopsi kebijakan local content quota, seperti Uni Eropa yang mewajibkan platform OTT memiliki minimal 30% konten lokal; Mengadopsi standar General Data Protection Regulation (GDPR) seperti di Uni Eropa untuk menjaga privasi pengguna.

"Beberapa rekomendasi kebijakan dalam revisi UU Penyiaran yaitu memperluas kewenangan KPI untuk mengawasi konten digital dan layanan OTT, termasuk sensor dan klasifikasi konten; Mengadopsi kebijakan local content quota, mengadopsi standar General Data Protection Regulation (GDPR)," demikian tutup Kager Aher mengakhiri wawancaranya.



image Istimewa

"Beberapa rekomendasi kebijakan dalam revisi UU Penyiaran yaitu memperluas kewenangan KPI untuk mengawasi konten digital dan layanan OTT, termasuk sensor dan klasifikasi konten; Mengadopsi kebijakan local content quota, mengadopsi standar General Data Protection Regulation (GDPR),"

**Dr. H. AHMAD
HERYAWAN, Lc., M.Si.**

Wakil Ketua Komisi I DPR RI



image istimewa

Aleg PKS Sukamta Kutuk Keras Serangan Israel ke Gaza di Tengah Berlangsungnya Gencatan Senjata

Jakarta (19/03) — Di tengah gencatan senjata yang masih berlangsung, Israel kembali melakukan pegeboman ke wilayah Gaza pada Selasa 18 Maret 2025. Menurut otoritas setempat akibat pemboman Israel hingga Selasa siang telah menewaskan lebih dari 300 orang yang kebanyakan anak-anak dan wanita.

Menanggapi hal ini, Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS Sukamta mengutuk keras serangan yang kembali dilakukan Israel ke wilayah Gaza. Apalagi serangan ini terjadi di Bulan Ramadhan, bulan suci umat Islam.

"Serangan ini jelas telah menciderai kesepakatan gencatan senjata, Israel sekali lagi menunjukkan tidak punya itikad

baik untuk perdamaian. Serangan yang juga menewaskan warga sipil yang kebanyakan anak-anak dan wanita ini juga menunjukkan hasrat Israel melakukan genosida masih tinggi," terang Sukamta.

Sukamta lebih jauh menengarai ada ambisi politik pribadi Netanyahu dibalik serangan ke Gaza di saat gencatan senjata.

"Publik dunia melihat Netanyahu saat ini dalam kondisi tekanan politik yang kuat di dalam dan luar negeri. Dengan serangan ini, Netanyahu ingin mendapatkan dukungan politik dari kelompok garis keras yang masih kuat di Israel. Tentu ambisi politik Netanyahu ini sangat berbahaya, karena dia tidak peduli soal kemanusiaan. Dia rela membunuh ribuan anak-anak Palestina untuk melanggengkan kekuasaan,"

"Kondisi warga Gaza pasca 15 bulan se-rangan Israel sangat berat, tanpa rumah, tanpa layanan kesehatan, tanpa makanan dan minuman yang layak. Gencatan senjata harus bisa tetap dilaksanakan, supaya warga Gaza memulai kehidupannya kembali.

H. SUKAMTA, Ph.D

Anggota Komisi I DPR RI

tegas Sukamta.

Wakil Ketua Fraksi PKS ini berharap pemerintah Indonesia perlu untuk melakukan langkah-langkah konkrit mencegah konflik meluas dan gencatan senjata terus bisa dilangsungkan.

"Kondisi warga Gaza pasca 15 bulan serangan Israel sangat berat, tanpa rumah, tanpa layanan kesehatan, tanpa makanan dan minuman yang layak. Gencatan senjata harus bisa tetap dilaksanakan, supaya warga Gaza memulai kehidupannya kembali. Mesir dan Qatar sebagai mediator serta PBB harus menekan Israel mau melaksanakan gencatan senjata. Kami berharap pemerintah Indonesia bisa lakukan tindak konkrit untuk pastikan gencatan senjata tetap berlanjut," tutup Anggota DPR RI dari Dapil Yogyakarta ini.



image istimewa

Komisi II FPKS Aus Hidayat Nur: Asing dan Pejabat Daerah Jangan Hambat Pembangunan Papua

Jakarta (20/03) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Aus Hidayat Nur menyentil pihak asing dan pejabat daerah yang menghambat pembangunan Papua yang menurutnya harus berfokus pada pembenahan SDM.

Hal tersebut disampaikan pada Rapat Dengar Pendapat Komisi II dengan 4 Gubernur Daerah Otonomi Baru di Jakarta, Kamis (13/03/2025).

"Pembangunan di Papua hanya akan berhasil manakala terlebih dahulu melakukan pembangunan jiwa masyarakat

terutama OAP (Orang Asli Papua) yaitu moral dan mental masyarakat," ucap legislator dari daerah pemilihan Kalimantan Timur itu.

Dalam rapat tersebut, ia mengungkapkan pengaruh dan campur tangan asing yang bisa menghambat pembangunan di Bumi Cendrawasih itu.

"Pihak asing berusaha merusak moralitas OAP sehingga menjadi musuh bagi Bangsa Indonesia dan selalu merasa terpisah dengan mensupport kerusakan moral seperti mabuk-mabukan , judi online, pinjaman online, main perempuan dan sebagainya," tukasnya.

Hal ini juga dicontohkan oleh para pejabat daerah Papua yang menyelewengkan dana otsus untuk senang-senang di Jakarta dan kota-kota di Pulau Jawa dan Sulawesi.

"Perlu pembangunan jiwa dan integrasi dengan mengirim anak-anak Papua belajar di sekolah-sekolah agama di pulau Jawa seperti Pesantren dan lain-lain. Pembangunan Papua mestinya fokus ke pendidikan, bukan hanya infrastruktur fisik. Dengan demikian pembaruan terjadi dengan peningkatan budaya dan akan menjadi benteng dari kerusakan moral," pungkasnya.

“Pihak asing berusaha merusak moralitas OAP sehingga menjadi musuh bagi Bangsa Indonesia dan selalu merasa terpisah dengan mensupport kerusakan moral seperti mabuk-mabukan , judi online, pinjaman online, main perempuan dan sebagainya,”

KH. AUS HIDAYAT NUR

Anggota Komisi II DPR RI



image istimewa

Dukung Pengembalian Sempadan Sungai, Aleg PKS Ateng Sutisna: Siap Berkolaborasi

Jakarta (19/03) -- Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ateng Sutisna mendukung upaya pengembalian sempadan sungai sesuai regulasi yang berlaku.

Pernyataan ini disampaikan sebagai tindak lanjut atas pertemuan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bersama Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dan 27 Bupati/Walikota se Jawa Barat di Balai Kota Depok, yang membahas pengaturan tanah di daerah aliran sungai (DAS) guna mencegah banjir dan menjaga ekosistem sungai.

"Saya sangat mendukung upaya pengembalian sempadan sungai sesuai regulasi yang ada. Ini bukan hanya penegakan aturan hukum semata, tetapi juga tentang bagaimana kelangsungan hidup masyarakat dan ekosistem sungai yang harus dijaga bersama," ujar Anggota Komisi II DPR-RI tersebut.

Ia menekankan bahwa sempadan sungai merupakan zona konservasi yang harus dijaga demi fungsi ekologisnya. Hal ini mengacu pada sejumlah regulasi seperti UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2011 tentang Sungai, dan Peraturan Menteri ATR/BPN No. 17 Tahun 2021 tentang Penataan Kawasan Sempadan Sungai.

"Aturan ini secara tegas

menyatakan bahwa sempadan sungai adalah bagian dari zona konservasi yang tidak bisa dikonversi menjadi permukiman atau infrastruktur lainnya. Namun, masih diperbolehkan untuk aktivitas pertanian berkelanjutan atau agroforestri yang tidak merusak ekosistem secara terbatas," ujar Ateng.

Dalam kesempatan yang sama, ia juga menyambut baik penerbitan sertifikat sempadan sungai yang dikelola oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) yang memiliki manfaat strategis seperti melindungi ekosistem sungai, mencegah alih fungsi lahan, mencegah konflik lahan akibat okupasi ilegal, dan dapat memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan lahan sempadan sungai.

"Sertifikasi lahan sempadan sungai sangat penting untuk memberikan kepastian hukum, mencegah konflik lahan, dan mencegah adanya potensi penyalahgunaan fungsi lahan yang akan berimplikasi kepada masa depan lingkungan sekitar," tambahnya.

Lebih lanjut, Ateng

Dukung Pengembalian Sempadan Sungai, Aleg PKS Ateng Sutisna: Siap Berkolaborasi

« SEBELUMNYA

menegaskan bahwa sertifikati ini akan memastikan bahwa tanah di sempadan sungai tetap menjadi aset negara dan diperuntukkan bagi kepentingan publik, seperti ruang terbuka hijau atau tanggul banjir.

“Kita ingin memastikan bahwa generasi mendatang masih bisa menikmati manfaat dari sungai yang lestari. Oleh karena itu, konservasi dan perlindungan lahan sempadan sungai harus menjadi prioritas

bersama,” jelasnya.

Anggota legislatif Dapil Jawa Barat IX tersebut juga menyatakan kesiapannya untuk mendukung Program Pemprov Jawa Barat dalam upaya menghijaukan kembali lahan-lahan sempadan sungai melalui berbagai kegiatan konservasi.

“Saya siap untuk membantu dan mendorong upaya konservasi agar sempadan sungai kembali hijau, baik melalui program reforestasi maupun penataan ekosistem sungai yang lebih berkelanjutan. Bahkan

saya siap berkontribusi dalam penyediaan bibit tanaman kehutanan, mulai dari penyusunan ranteknya hingga kegiatan penanamannya,” pungkask Ateng.

Dengan adanya langkah kolaboratif dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta dukungan dari legislatif, diharapkan upaya normalisasi dan pelestarian sungai dapat berjalan lebih efektif demi kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

“Kita tidak hanya berbicara tentang lingkungan, tetapi juga tentang kesejahteraan masyarakat. Sungai yang sehat akan memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan ekologi bagi masyarakat sekitar,” tutupnya.



image istimewa



“Sertifikasi lahan sempadan sungai sangat penting untuk memberikan kepastian hukum, mencegah konflik lahan, dan mencegah adanya potensi penyalahgunaan fungsi lahan yang akan berimplikasi kepada masa depan lingkungan sekitar,”

Ir. H. ATENG SUTISNA

Anggota Komisi II DPR RI



image istimewa

DPR Minta MA Perhatikan Kesejahteraan Hakim “Ad Hoc”

JAKARTA, KOMPAS — Komisi III DPR meminta Mahkamah Agung memperhatikan kesejahteraan ratusan hakim ad hoc yang hak keuangannya belum naik selama kurun waktu 12 tahun.

Para hakim ad hoc tersebut tidak merasakan kenaikan gaji pokok dan tunjangan seperti yang dinikmati para hakim karier sejak Oktober 2024, sesuai aksi cuti “Saya tahu beban dan tanggung jawab mereka (para hakim ad hoc).

Mereka juga menghadapi hal yang sama dengan hakim-hakim karier. Kita sadar bahwa hakim ad hoc atau hakim non-karier itu juga mandat reformasi, salah satu mandat reformasi dalam konteks pembaruan peradilan. Mudah-mudahan Pak Sekma (Sekretaris Mahkamah Agung) dan Pak Dirjen (Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MA) bisa memberikan perhatian kepada hakim-hakim ad hoc yang hari ini memang sangat memprihatinkan,” ujar anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Nasir Djamil, dalam rapat dengar pendapat Komisi III DPR dengan Sekretaris MA Sugiyanto dan Dirjen Badilum MA Bambang Myanto, Kamis (13/3/2025).

Selama ini, hak keuangan para hakim ad hoc di Indonesia didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2013 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Ad Hoc. Mengacu perpres tersebut, besaran tunjangan bagi hakim ad hoc tipikor tingkat pertama Rp 20,5 juta, hakim ad hoc tipikor tingkat banding Rp 25 juta, dan hakim ad hoc tingkat kasasi senilai Rp 40 juta.

Besaran tunjangan hakim ad hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial tingkat pertama Rp 17,5 juta dan tingkat banding Rp 32,5 juta. Adapun hakim ad hoc pada Pengadilan Perikanan Rp 17,5 juta.

Dipotong pajak

Besaran tunjangan tersebut tidak sepenuhnya diterima oleh para hakim ad hoc karena masih harus dipotong pajak. Tunjangan bersih yang diterima hakim ad hoc tipikor pada pengadilan tingkat pertama, misalnya, menerima penghasilan bersih senilai Rp 18,6 juta.

Lain halnya dengan para hakim karier yang sudah menerima penyesuaian gaji pokok dan tunjangan sejak tahun lalu. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas PP No 94/2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung, pemerintah menaikkan gaji dan tunjangan hakim.

Misalnya, gaji hakim dengan masa kerja 0-1 tahun yang semula Rp 2,06 juta menjadi Rp 2,78 juta. Adapun tunjangan hakim tingkat pertama kelas 1A khusus yang semula Rp 14 juta menjadi Rp 19,6 juta. Demikian seterusnya, kenaikan tersebut bervariasi tergantung masa kerja dan jaba-tan yang diemban.

Nasir Djamil dalam rapat dengar pendapat mengaku tidak mengetahui sampai di mana usulan revisi Perpres No. 5/2013 saat ini berada. Hal ini juga tidak terjawab dalam rapat dengar pendapat karena Sugiyanto dan Bambang tidak

DPR Minta MA Perhatikan Kesejahteraan Hakim "Ad Hoc"

« SEBELUMNYA

memberikan tanggapan resmi atas lontaran pernyataan Nasir. Waktu yang tersedia terbatas sementara keduanya harus menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh sejumlah anggota Komisi III DPR. Pimpinan rapat pun beberapa kali mengingatkan terkait keterbatasan waktu tersebut dan meminta agar jawaban lebih lengkap diberikan secara tertulis.

Menyayangkan sikap Forum Solidaritas Hakim Ad Hoc (FSHA) Indonesia menyangkan hal tersebut. Tidak adanya keterangan dalam forum resmi mengenai nasib hak keuangan hakim ad hoc itu mengesankan MA enggan membahas kesejahteraan hakim ad hoc. Apalagi jika mengingat MA merupakan lembaga tempat bernaung para



hakim ad hoc yang seharusnya memperjuangkan nasib mereka.

Hakim ad hoc tipikor pada Pengadilan Tinggi Bandung, Lufiana Abdullah Aman, mengatakan, hal tersebut justru memperlebar jurang ketimpangan antara hakim karier dan hakim ad hoc. Kondisi itu menimbulkan kekecewaan mendalam bagi para hakim ad hoc di seluruh Indonesia.

"Hal ini pun menunjukkan bahwa Mahkamah Agung tidak serius dalam memperjuangkan perubahan Perpres No. 5 Tahun 2013 bagi hakim ad hoc," ujar Lufsiana.

Menurut dia, para hakim ad hoc sudah cukup bersabar selama 12 tahun dengan hanya mengandalkan hidup dari tunjangan yang tak seberapa tanpa gaji pokok. Nominal tunjangan tersebut pun masih berkurang karena masih dipotong pajak, membayar kekurangan (alias nombok) sewa kos, dan transportasi hakim.

Hakim ad hoc selama ini tak memiliki tunjangan pajak, tunjangan kemahalan, tunjangan kinerja, hak remunerasi, tunjangan beras, tunjangan makan, tunjangan keluarga, jaminan pensiun, jaminan hari tua, jaminan kematian, dan jaminan kecelakaan kerja.

"Sudah waktunya hakim ad hoc diberikan keadilan dan perlakuan yang sama dari negara demi mempertahankan moral dan integritas yang selama ini telah teruji di lapangan," kata Lufsiana.

Untuk itu, FSHA Indonesia mendesak Presiden Prabowo Subianto, MA, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Keuangan, Sekretariat Negara, serta Kementerian Hukum untuk dapat segera menyergerakkan revisi Perpres No 5/2013. Revisi tersebut sudah tertunda sejak 2023 hingga saat ini.

Apabila hal tersebut dibiarkan, FSHA menyatakan dalam waktu dekat para hakim ad hoc se-Indonesia lintas matra akan melakukan istigash bersama di depan Istana Negara untuk menuntut keadilan dan hak penghidupan yang layak kepada Presiden. Mereka ingin menagih janji kampanye Presiden dalam mewujudkan kesejahteraan hakim, khususnya hakim ad hoc, agar tidak dikanaktirikan.

Sekretaris MA Sugiyanto mengatakan, pihaknya berkomitmen memperbaiki kesejahteraan hakim ke depan. Selain pengaturan gaji pokok dan pensiunan bagi hakim, MA juga berencana membangun flat hunian untuk para hakim demi memenuhi jaminan keamanan bagi hakim dan keluarganya. (ANA)



image istimewa

Kita sadar bahwa hakim ad hoc atau hakim nonkarier itu juga mandat reformasi, salah satu mandat reformasi dalam konte-ks pembaruan peradilan. Mudah-mudahan Pak Sekma (Sekretaris Mahkamah Agung) dan Pak Dirjen (Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MA) bisa memberikan perhatian kepada hakim-hakim ad hoc yang hari ini memang sangat memprihatinkan,"

Dr. H.M. NASIR DJAMIL, M.Si

Anggota Komisi III DPR RI

Apresiasi Polri Intensifkan
Patroli Ramadan,

Aleg PKS Harap Pemda dan Ortu Proaktif Cegah Tawuran dan Balap Liar

Jakarta (18/03) — Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera PKS Surahman Hidayat, mengapresiasi Polri dalam mengintensifkan patroli di bulan Ramadhan untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat

serta memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif di tengah maraknya tawuran dan balap liar yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia.

“Maraknya tawuran dan balap liar tentunya telah mengganggu kekhusyukan masyarakat dalam menjalani ibadah Ramadhan,” ujar Surahman.

Surahman mengatakan disebabkan maraknya tawuran dan balap liar di waktu dini hari sampai dengan menjelang sub-

uh telah menyebabkan sebagian masyarakat ketakutan atau cenderung khawatir untuk ke luar rumah untuk sekedar beli makan sahur atau pergi ke masjid.

“Saya mengapresiasi upaya Polri yang mengintensifkan patroli di berbagai daerah. Patroli yang telah dilakukan diberbagai lokasi yang sering dijadikan tempat berkumpulnya anak-anak sebagai upaya pencegahan terjadinya tawuran dan balap liar,” tutur Surahman.

Surahman juga mendo’akan tim patroli Polri di seluruh daerah agar diberikan kesehatan dan kekuatan dalam mengemban tugas serta diberikan kebahagiaan dan keberkahan di bulan Ramadhan ini oleh Allah Subhanahu Wa Ta’ala.

“Seharusnya masalah tawuran dan balap liar ini bukan hanya menjadi tanggung jawab kepolisian untuk melakukan pencegahan, akan tetapi juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah setempat,” kata Surahman.

Menurut Surahman, pemerintah daerah setempat harus turut menjaga dan menciptakan rasa aman bagi masyarakat di daerahnya masing-masing dengan membuat berbagai kebijakan yang dapat mengakomodasi penanganan tawuran dan balap liar di kalangan remaja secara komprehensif.

“Peran orang tua juga dibutuhkan dalam menangani masalah ini. Orang tua punya tanggung jawab terhadap anak-anaknya antara lain dengan mengajarkan nilai moral dan agama, mengingatkan dampak buruk tawuran, dan meluangkan waktu bersama anak,” imbuh Surahman.

Surahman menyampaikan orang tua juga perlu mengawasi pergaulan dan aktivitas anaknya di luar rumah, termasuk mendisiplinkan anak antara lain dengan membuat aturan batas jam malam untuk diperbolehkan main atau nongkrong ke



“Saya mengapresiasi upaya Polri yang mengintensifkan patroli di berbagai daerah. Patroli yang telah dilakukan diberbagai lokasi yang sering dijadikan tempat berkumpulnya anak-anak sebagai upaya pencegahan terjadinya tawuran dan balap liar,”

**Dr. KH. SURAHMAN
HIDAYAT, M.A.**

Anggota Komisi III DPR RI

luar rumah.

“Orang tua juga harus berusaha menjadikan rumah sebagai tempat yang nyaman dan aman bagi anak, sehingga anak tidak perlu mencari

kenyamanan di luar rumah dan beraktivitas negatif atau menyimpang hanya untuk menarik perhatian orang tua,” pungkas Surahman.



Komisi III FPKS Habib Aboe Minta Insiden Baku Tembak di Kampung Karang Manik Diinvestigasi

Jakarta (18/03) — Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Habib Aboe Bakar Alhabsyi, menyampaikan rasa prihatin dan duka cita yang mendalam atas gugurnya tiga anggota Polda Lampung dalam insiden baku tembak

yang terjadi saat penggerebekan di sebuah arena judi sabung ayam di Kampung Karang Manik, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Way Kanan, Senin (17/03/2025).

"Ini merupakan tragedi yang sangat menyedihkan. Kami sangat menyesalkan

insiden ini dan turut berduka cita atas wafatnya Kapolsek Negara Batin, Iptu Lusiyanto, serta dua anggota kepolisian lainnya, Bripka Petrus Apriyanto dan Bripda M Ghalib Surya Ganta," ujar Anggota Komisi III tersebut.

Lebih lanjut, Aboe Bakar menekankan pentingnya investigasi yang mendalam terkait kejadian ini.

"Kami meminta agar pihak berwenang melakukan penyelidikan secara tuntas dan transparan untuk mengungkap semua fakta yang ada. Keamanan dan keselamatan petugas kepolisian harus menjadi prioritas utama dalam setiap menjalankan yang dilaksanakan,"

"Kami meminta agar pihak berwenang melakukan penyelidikan secara tuntas dan transparan untuk mengungkap semua fakta yang ada.

Keamanan dan keselamatan petugas kepolisian harus menjadi prioritas utama dalam setiap menjalankan yang dilaksanakan,"

**HABIB ABOE
BAKAR ALHABSYI**

Anggota Komisi III DPR RI

tambah Sekjend DPP PKS.

Aboe Bakar juga meminta agar semua pihak menahan diri, tidak melakukan aksi apapun sebagai respons insiden ini.

"Kita tunggu penyelidikan dan proses hukum yang berlaku, semua pihak harus bisa menahan diri dengan baik," ujar Wakil Ketua MKD tersebut.

Lebih lanjut Aboe Bakar menyatakan bahwa Komisi III DPR RI akan terus memantau perkembangan kasus ini dan berharap seluruh proses hukum berjalan dengan adil dan terbuka.



Aleg PKS Johan Desak Kementan Bertanggung Jawab atas Temuan Beras Impor Berkutu

Jakarta (17/03) --- Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan, mendesak Kementerian Pertanian untuk bertanggung jawab atas temuan beras impor berkutu yang menumpuk di gudang Bulog.

Menurutnya, temuan ini menunjukkan lemahnya tata kelola pangan nasional dan berpotensi merugikan keuangan negara serta mengancam keamanan pangan masyarakat.

Johan Rosihan menyoroti bahwa beras berkutu yang ditemukan di Gudang Bulog Yogyakarta merupakan sisa stok beras impor tahun lalu.

Berdasarkan laporan, terdapat sekitar 100.000 hingga 300.000 ton beras impor yang mengalami kerusakan akibat serangan hama.

Ia mempertanyakan kebijakan impor yang dinilai berlebihan dan tidak segera disalurkan, sehingga mengendap di gudang hingga tidak layak konsumsi.

"Kasus ini menunjukkan buruknya perencanaan dalam kebijakan pangan nasional. Mengapa pemerintah tetap mengandalkan impor dalam jumlah besar jika akhirnya malah menumpuk dan tidak bisa digunakan? Ini bentuk pemborosan yang merugikan negara, sangat bertentangan dengan kebijakan efisiensi pak Presiden Prabowo" kata Johan Rosihan di Jakarta,

Senin (17/03).

Ia mendesak Kementerian Perdagangan untuk melakukan audit menyeluruh terhadap mekanisme pengadaan dan penyimpanan beras impor. Selain itu, ia meminta Badan Pangan Nasional memastikan tata kelola stok lebih efisien agar kasus serupa tidak terulang.

Kepada Bulog, Johan menekankan perlunya transparansi dalam penanganan beras berkutu ini dan memastikan bahwa beras yang disalurkan kepada masyarakat benar-benar layak konsumsi.

Johan juga menyoroti pen-

tingnya penguatan produksi dalam negeri agar ketergantungan terhadap impor dapat dikurangi.

Ia meminta Kementerian Pertanian meningkatkan dukungan bagi petani lokal agar mampu memenuhi kebutuhan nasional secara mandiri.

"Kita harus memperbaiki kebijakan pangan agar lebih berpihak kepada petani dan memastikan stok beras yang tersedia berkualitas baik untuk masyarakat. Pemerintah tidak boleh terus bergantung pada impor yang akhirnya merugikan rakyat sendiri," tegasnya.

Ia menegaskan bahwa kasus ini harus menjadi momentum evaluasi besar-besaran terhadap kebijakan pangan nasional. Komisi IV DPR RI akan terus mengawasi langkah-langkah pemerintah dalam menangani permasalahan ini demi kepentingan masyarakat luas.

"Kita harus memperbaiki kebijakan pangan agar lebih berpihak kepada petani dan memastikan stok beras yang tersedia berkualitas baik untuk masyarakat. Pemerintah tidak boleh terus bergantung pada impor yang akhirnya merugikan rakyat sendiri,"

H. JOHAN ROSIHAN, S.T
Anggota Komisi IV DPR RI

2020/3/4 16:0
image istimewa

Apresiasi Pokja Pemantauan Pupuk Subsidi, Anggota FPKS Saadiah: Harus Efektif Cegah Penyimpangan

Jakarta (14/03) — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Saadiah Uluputty, mengapresiasi langkah pemerintah yang membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pupuk Bersubsidi berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pangan Nomor 06/M.PANGAN/KEP/02/2025 tertanggal 25 Februari 2025.

Menurut Saadiah, langkah ini penting sebagai upaya memastikan distribusi pupuk bersubsidi tepat sasaran, tepat waktu, dan transparan.

"Kita sering menemukan penyimpangan dalam penyaluran pupuk bersubsidi, mulai dari kelangkaan hingga penyalahgunaan oleh pihak tertentu. Dengan adanya Pokja ini, saya harap distribusi pupuk subsidi lebih transparan dan dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh para petani," ujar Saadiah di Jakarta, Rabu (12/03/2025).

Politisi PKS ini memaparkan, dari data yang ia kumpulkan dari berbagai sumber, ada dinamisasi alokasi pupuk subsidi dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2022, volume pupuk bersubsidi tercatat sebanyak 7,4 juta ton dengan anggaran sebesar Rp25,28 triliun.

Selanjutnya, pada tahun 2023, pemerintah menyediakan

anggaran Rp24 triliun, meskipun awalnya dialokasikan sebesar 7,85 juta ton, ada perubahan target penyaluran sebesar 6,19 juta ton dimana di kalaim oleh PT Pupuk Indonesia tercapai 100% penyaluran pada laporan di tahun 2024. Pada tahun 2024, awalnya 4,7 juta ton, kemudian terjadi peningkatan signifikan di mana volume pupuk subsidi mencapai 9,55 juta ton dengan anggaran subsidi mencapai Rp54 triliun.

Pada tahun 2025, skema penebusan pupuk subsidi telah disederhanakan untuk memastikan distribusi lebih efisien dan transparan. Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 644/KPTS/SR.310/M.11/2024, pemerintah menetapkan alokasi pupuk bersubsidi sebesar 9,5 juta ton. Alokasi tersebut terbagi menjadi Urea 4,6 juta ton, NPK 4,2 juta ton, NPK Kakao 147.000 ton, dan

Apresiasi Pokja Pemantauan Pupuk Subsidi, Anggota FPKS Saadiah: Harus Efektif Cegah Penyimpangan

« SEBELUMNYA

Organik 500.000 ton.

"Saya mengalami peristiwa perubahan-perubahan pupuk subsidi di Komisi IV, bahkan pada tahun yang sama. Tren peningkatan anggaran dan volume pupuk subsidi ini harus diikuti dengan pengawasan ketat, agar alokasi besar yang sudah disiapkan benar-benar sampai ke tangan petani secara optimal," jelas politisi asal Maluku ini.

Ia juga mengingatkan beberapa kasus penyimpangan dalam dua tahun terakhir yang menunjukkan perlunya peran aktif dari Pokja. Saadiah

menyebut, pada Maret 2025, Polres Jember mengungkap kasus distribusi ilegal pupuk Phonska di luar wilayah Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), yang menyebabkan kelangkaan pupuk di kalangan petani. Kasus lainnya terjadi pada November 2024, di mana Polda Jawa Barat membongkar aksi penimbunan hampir 34 ton pupuk bersubsidi yang dijual melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET).

Selain itu, pada Desember 2024, Satgas Pangan Bareskrim Polri menemukan modus pemalsuan data penerima pupuk subsidi di Kabupaten Tangerang, Banten, yang mencantumkan

nama-nama petani yang sudah meninggal dunia untuk menjual kembali pupuk bersubsidi dengan harga lebih tinggi.

"Pokja ini harus mampu mengawal secara ketat agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Evaluasi rutin harus dilakukan dengan transparan dan tegas menindak pelanggaran agar subsidi pupuk benar-benar membantu petani serta mendorong peningkatan produksi pangan nasional," tegas Saadiah.

"Saya berharap, pembentukan Pokja bukan hanya menjadi kebijakan formal, melainkan mampu menjadi instrumen pengawasan nyata yang efektif di lapangan, sehingga manfaat subsidi pupuk dapat dirasakan secara nyata oleh seluruh petani Indonesia," tutup Saadiah Uluputty.



image istimewa



"Kita sering menemukan penyimpangan dalam penyaluran pupuk bersubsidi, mulai dari kelangkaan hingga penyalahgunaan oleh pihak tertentu. Dengan adanya Pokja ini, saya harap distribusi pupuk subsidi lebih transparan dan dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh para petani,"

SAADIAH ULUPUTTY, S.T

Anggota Komisi IV DPR RI

BONUS HARI RAYA (BHR) UNTUK OJOL & KURIR
OASE KESEJAHTERAAN DI BULAN SUCI

PKS TV DPR RI | PKS DPR RI | @fraksipdpr | @fraksipdpr

11 Maret 2025
Menteri Ketenagakerjaan,
Yusuf Mulyana
SE Menaker
No. 102/HK/OL.00/19/2025
Hari Raya (BHR) keagamaan
untuk Pengemudi dan Kurir
pada Layanan Angkutan
Berbasis Aplikasi.

Poin penting SE Menaker:

- Bonus Hari Raya (BHR) diberikan kepada seluruh pengemudi dan kurir online yang terdaftar secara resmi
- BHR diberikan paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri 1446 H
- BHR diberikan proporsional sesuai kinerja dalam bentuk uang tunai dengan perhitungan sebesar 20% dari rata-rata pendapatan bersih selama 12 bulan terakhir atau sesuai kemampuan kriteria tersebut

PKS TV DPR RI | PKS DPR RI | @fraksipdpr | @fraksipdpr | @fraksipdpr

sumber: Berita PKS | Grafik: Hart

"Untuk itu, pemerintah mengimbau kepada seluruh perusahaan layanan angkutan berbasis aplikasi untuk memberi **bonus hari raya** kepada pengemudi dan kurir online dalam bentuk uang tunai dengan mempertimbangkan keaktifan kerja."

Presiden Prabowo Subianto

PKS TV DPR RI | PKS DPR RI | @fraksipdpr | @fraksipdpr | @fraksipdpr

sumber: Berita PKS | Grafik: Hart

MENGAPA PEMBERIAN BHR PENTING?

1,5 JUTA
Pengemudi ojek online dan pekerja berbasis aplikasi
(nbcibisnis.com)

Pengemudi ojek online bekerja penuh resiko (cuaca, lalu lintas, keamanan) **tanpa adanya perlindungan memadai.**

Kehadiran ojek online merupakan sarana lapangan kerja yang sangat luas dan berkontribusi pada **perekonomian negara.**

Status sebagai mitra membuat mereka tidak mendapat hak sebagai pekerja, **termasuk THR.**

"Kontrol 2% (perusahaan ojek online dan aplikasi) kepada negara, bisa jadi tidak hanya aplikasi tapi para pengemudi online yang juga memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional"
Rizki Anwar, S.H., M.PdEd

PKS TV DPR RI | PKS DPR RI | @fraksipdpr | @fraksipdpr | @fraksipdpr

sumber: Berita PKS | Grafik: Hart

DAMPAK POSITIF BHR BAGI OJOL DAN KURIR

Meningkatkan kesejahteraan dan motivasi kerja

Memperkuat hubungan antara aplikasi dan pengemudi

Meningkatkan daya beli menjelang hari raya

BHR BAGI OJOL DAN KURIR: OASE DI BULAN SUCI RAMADHAN

Pemberian BHR bukan akhir, melainkan harus menjadi awal bagi kepastian dan kesejahteraan pengemudi ojek online dan kurir aplikasi.

PKS TV DPR RI | PKS DPR RI | @fraksipdpr | @fraksipdpr | @fraksipdpr

sumber: Berita PKS | Grafik: Hart

THR sebagai bentuk Kepedulian dan Apresiasi

"Para pengemudi ojek dan kurir online telah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Mereka bekerja keras, menghadapi berbagai tantangan di jalan, dan tetap melayani meskipun dalam situasi sulit. THR untuk mereka adalah bentuk **kepedulian dan apresiasi** yang layak diberikan."

Dr. Hj. Netty Prasetyani, S.S., M.Si
Anggota Komisi IX DPR RI

PKS TV DPR RI | PKS DPR RI | @fraksipdpr | @fraksipdpr | @fraksipdpr

sumber: Berita PKS | Grafik: Hart



image istimewa

Diskusi Bahas Revisi RUU LLAJ, Yanuar Arif Tekankan Perlunya Pengaturan Pengemudi Transportasi Online

Jakarta (11/03) --- Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKS, Yanuar Arif Wibowo, menghadiri Forum Legislasi yang diselenggarakan oleh Koordinator Wartawan Parlemen (KWP) bekerja sama dengan Biro Pemberitaan DPR RI, pada Selasa (11/3).

Diskusi yang bertema 'Revisi RUU LLAJ Diharapkan Mengatur Status Hukum Pengemudi Transportasi Online hingga Tarif Layanan' yang diadakan di Ruang PPIP Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, (11/03).

Dalam kesempatan tersebut, Yanuar Arif Wibowo mengungkapkan pentingnya pengaturan yang jelas bagi pengemudi transportasi online (ojol) agar dapat memberikan kesejahteraan lebih baik bagi mereka. Yanuar menyampaikan bahwa revisi RUU LLAJ sangat relevan dengan dinamika saat ini.

"Anggota Komisi V sangat menyadari kebutuhan adanya payung hukum untuk pengemudi transportasi online. Mengingat jumlahnya yang terus meningkat, dengan lebih dari 1 juta pengemudi, sudah saatnya regulasi yang ada bisa memberikan perlindungan dan kejelasan," ungkapnya.

Dalam forum tersebut, pengamat transportasi, Darmaningtyas, memberikan penjelasan terkait perkembangan regulasi transportasi online.

la menjelaskan, pada saat

RUU LLAJ disusun pada tahun 2009, perdebatan mengenai apakah ojek harus diatur dalam undang-undang atau tidak sempat muncul, namun akhirnya keputusan diambil untuk tidak memasukkannya. Darmaningtyas menambahkan bahwa meski ojek tidak diatur dalam UU, pengemudi transportasi online telah beroperasi berdasarkan peraturan menteri yang keluar pada 2015 dan diperbaharui menjadi Permenhub 12/2019.

"Masalah utama bagi pengemudi adalah bukan legalitasnya, tetapi kesejahteraan mereka yang terus menurun," ujar Darmaningtyas.

Menurut Darmaningtyas, isu kesejahteraan pengemudi menjadi semakin penting seiring dengan menurunnya pendapatan mereka, yang awalnya tinggi di tahun-tahun kejayaan, namun kini semakin menurun karena penurunan permintaan serta pengurangan tarif oleh aplikasi.

"Saya memiliki data yang menunjukkan bahwa pendapat-

Diskusi Bahas Revisi RUU LLAJ, Yanuar Arif Tekankan Perlu Pengaturan Pengemudi Transportasi Online

« SEBELUMNYA

an pengemudi ojol mulai menurun setelah 2018, setelah mengalami lonjakan yang signifikan di tahun-tahun sebelumnya," ujarnya.

Seiring dengan itu, Yanuar juga menyampaikan bahwa revisi ini perlu memperhatikan beberapa hal, termasuk pengaturan status pengemudi ojol sebagai angkutan umum berplat kuning.

"Revisi UU LLAJ ini akan mencakup banyak aspek, tidak hanya sekedar memasukkan sepeda motor sebagai angkutan penumpang, tetapi juga mengatur soal SIM khusus

hingga standar pelayanan yang harus dipenuhi oleh pengemudi ojol. Ini semua butuh kajian mendalam dan masukan dari berbagai pihak," jelasnya.

Terkait dengan isu kesejahteraan pengemudi, Darmaningtyas juga menyoroti pentingnya pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) untuk pengemudi.

"Aplikator pasti memperoleh keuntungan besar dari jumlah pengemudi dan pergerakan barang, jadi sudah semestinya mereka memberikan THR kepada pengemudi sebagai bentuk apresiasi terhadap kontribusi mereka," tambahnya.

Forum ini juga membuka ruang tanya jawab, di mana

para peserta mengungkapkan pendapat mereka tentang pengaturan ojol dalam UU LLAJ. Salah satu pertanyaan yang muncul adalah mengenai potongan yang terlalu besar oleh aplikasi yang mengurangi pendapatan pengemudi.

"Kami sangat memahami kekhawatiran pengemudi terkait pemotongan yang tinggi. Oleh karena itu, pengaturan terkait tarif dan pengaturan komisi harus dibahas dengan seksama," pungkas Yanuar.

Revisi RUU LLAJ diharapkan kedepannya dapat menjadi solusi bagi masalah yang dihadapi pengemudi transportasi online.



image istimewa



"Revisi UU LLAJ ini akan mencakup banyak aspek, tidak hanya sekedar memasukkan sepeda motor sebagai angkutan penumpang, tetapi juga mengatur soal SIM khusus hingga standar pelayanan yang harus dipenuhi oleh pengemudi ojol. Ini semua butuh kajian mendalam dan masukan dari berbagai pihak,"

H. YANUAR ARIF WIBOWO, S.H.

Anggota Komisi V DPR RI



image istimewa

Aleg PKS Amin Ak Desak Mendag dan Polri Tuntaskan Kasus Penipuan Minyakita

Jakarta (14/03) — Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Amin Ak, mendesak Menteri Perdagangan (Mendag) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk segera menuntaskan kasus penipuan terkait produk Minyakita yang merugikan masyarakat.

Baru-baru ini, beredar video viral di media sosial yang menunjukkan bahwa kemasan Minyakita berlabel 1 liter ternyata hanya berisi sekitar 750 milliliter.

"Praktik curang seperti ini tidak dapat ditoleransi. Masyarakat sudah cukup terbebani dengan kenaikan harga kebutuhan pokok, dan kini mereka harus menghadapi penipuan dalam takaran minyak goreng yang seharusnya menjadi hak mereka," tegas Amin.

Kasus ini, kata Amin, menambah deretan permasalahan dalam distribusi minyak goreng di Indonesia.

"Sebelumnya, terjadi kasus penimbunan Minyakita yang menyebabkan kelangkaan di pasaran dan melonjaknya harga di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp 15.700 per liter. Selain itu, ditemukan pula produksi dan peredaran Minyakita palsu dengan isi yang tidak sesuai standar," terangnya.

Data dari Badan Pangan Nasional, imbuhnya, menunjukkan bahwa konsumsi minyak

goreng per kapita di Indonesia meningkat dari 16,04 kilogram pada 2022 menjadi 29,16 kilogram pada 2024. Peningkatan konsumsi ini seharusnya diimbangi dengan pengawasan ketat terhadap distribusi dan kualitas produk minyak goreng di pasaran.

Wakil Ketua Fraksi PKS itu juga menyoroti dugaan keberadaan mafia minyak goreng yang memanfaatkan situasi untuk meraup keuntungan dengan cara yang tidak sah.

"Jika betul mafia minyak goreng ini ada, harus diberantas. Mereka tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga merusak tatanan ekonomi dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah," ujarnya.

Di samping itu, lanjut Amin, pemerintah juga harus segera selesaikan utang rafaksi kepada pelaku usaha minyak goreng.

"Jangan sampai masih ada produsen minyak goreng yang masih menunggu pembayaran

Aleg PKS Amin Ak Desak Mendag dan Polri Tuntaskan Kasus Penipuan MinyakKita

« SEBELUMNYA

selisih harga dari program subsidi yang dijanjikan pemerintah sejak 2022. Jangan sampai kelalaian Kemendag soal utang rafaksi memiliki keterkaitan dengan munculnya aksi pengurangan takaran MinyakKita," katanya.

Para produsen minyak goreng telah membantu menjaga stabilitas harga dengan mengikuti kebijakan pemerintah. Karena itu utang rafaksi harus segera diselesaikan. Agar tidak

berdampak pada kelangsungan produksi serta distribusi minyak goreng di dalam negeri.

Untuk itu, Amin Ak mendesak Mendag dan Polri untuk, pertama, Melakukan investigasi menyeluruh terhadap kasus penipuan takaran MinyakKita dan memastikan pelaku mendapatkan sanksi tegas sesuai hukum yang berlaku.

"Kedua, Meningkatkan pengawasan terhadap produksi dan distribusi minyak goreng, khususnya produk MinyakKita, untuk memastikan kualitas dan

kuantitas sesuai standar yang ditetapkan," sebutnya.

Ketiga, lanjut Amin, membongkar jaringan mafia minyak goreng yang merugikan masyarakat dan mengambil langkah preventif agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.

"Keempat, segera menyelesaikan pembayaran utang rafaksi minyak goreng kepada pelaku usaha agar rantai pasokan minyak goreng tetap berjalan lancar dan harga tetap stabil di pasar. Kami di Komisi VI DPR RI akan terus mengawal isu ini dan memastikan pemerintah mengambil langkah konkret untuk melindungi hak konsumen serta menjaga stabilitas pasar minyak goreng nasional," tutup Amin.



image.istimewa



"Jangan sampai masih ada produsen minyak goreng yang masih menunggu pembayaran selisih harga dari program subsidi yang dijanjikan pemerintah sejak 2022. Jangan sampai kelalaian Kemendag soal utang rafaksi memiliki keterkaitan dengan munculnya aksi pengurangan takaran MinyakKita,

AMIN AK, M.M.
Anggota Komisi VI DPR RI



Aleg PKS Izzuddin Al-Qassam: IKM Naik Kelas, Maluku Utara Semakin Maju

Jakarta (12/03) --- Anggota DPR RI Komisi VII Fraksi PKS Dapil Maluku Utara, Izzuddin Al-Qassam, menegaskan dukungan penuh terhadap pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM) di Indonesia, dengan penekanan khusus pada kondisi dan potensi IKM di Maluku Utara.

"IKM merupakan tulang punggung ekonomi yang menyerap 13,11 juta tenaga kerja melalui 4,5 juta unit usaha, dan harus terus ditingkatkan melalui program pelatihan serta akses pasar digital," ujar Al-Qassam.

Di Maluku Utara, imbuhan, kondisi IKM menunjukkan dinamika positif meskipun masih dihadapkan pada tantangan infrastruktur dan akses permodalan.

"Di Kabupaten Halmahera Selatan, khususnya di Kecamatan Bacan, IKM berkembang pesat. Data terbaru yang dilansir oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Maluku Utara menunjukkan bahwa Bacan mencatat 1099 unit usaha, menjadikannya kawasan dengan pertumbuhan UMKM paling pesat di wilayah tersebut," sebutnya.

Di Bacan, lanjut Al-Qassam, IKM didominasi oleh sektor industri pangan, pengolahan hasil perikanan, dan kerajinan yang memberdayakan masyarakat lokal.

"Inisiatif seperti pelatihan intensif di bidang fashion dan

saing, dan menciptakan lapangan kerja baru.

"Sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan lembaga keuangan sangat penting untuk memastikan setiap IKM, terutama di daerah seperti Bacan, mendapatkan dukungan optimal," ujarnya.

Dengan pendekatan yang merakyat dan berbasis kepedulian, Al-Qassam mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus mendampingi pengembangan IKM di seluruh Maluku Utara.

"Kita harus bersama-sama menciptakan ekosistem industri yang inklusif dan berdaya saing tinggi, sehingga setiap usaha—dari yang berskala mikro hingga menengah—dapat berkontribusi pada kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat," pungkasnya mengakhiri.

"Inisiatif seperti pelatihan intensif di bidang fashion dan kriya serta pendampingan pemasaran melalui platform digital akan membantu pengusaha mengoptimalkan potensi lokal, meningkatkan kualitas produk, dan membuka akses pasar yang lebih luas,"

IZZUDDIN ALQASSAM KASUBA

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Maluku Utara

Enam WNI Wafat dalam Kecelakaan Bus di Makkah-Madinah

Aleg PKS Sampaikan Duka dan Catatan Penting

Jakarta (23/03) — Perjalanan suci jemaah umrah asal Indonesia dilanda duka mendalam. Sebuah kecelakaan tragis terjadi di jalan raya yang menghubungkan Makkah dan Madinah, Arab Saudi,

pada Kamis (20/3/2025) pukul 13.30 Waktu Arab Saudi (WAS), merenggut nyawa enam warga negara Indonesia (WNI).

Bus yang mengangkut rombongan jemaah mengalami tabrakan hebat, berujung pada terbalk-nya kendaraan.

Tragedi ini segera memicu keprihatinan dari berbagai pihak, termasuk anggota Komisi VIII DPR RI, Abdul Fikri Faqih.

Dalam pernyataan resminya, politisi yang akrab disapa Fikri tersebut menyampaikan duka cita mendalam, seraya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk memanjatkan doa bagi para korban.

"Mari kita semua berdoa agar para jemaah yang wafat

diterima Allah SWT dan mendapat kemuliaan di sisi-Nya, mengingat mereka meninggal dalam perjalanan ibadah umrah. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, dan bagi mereka yang sedang menjalani perawatan, semoga Allah SWT segera memberikan kesembuhan," ujar Fikri, Sabtu (22/03/2025) di Jakarta.

Lebih lanjut, Fikri juga menyampaikan sejumlah catatan penting terkait kejadian ini, terutama kepada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Kementerian Agama RI yang mengemban amanah pengelolaan ibadah haji Indonesia di Arab Saudi tahun ini dan Badan

Penyelenggara Haji (BPH) pada tahun-tahun selanjutnya.

"Penting untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap kondisi seluruh armada, khususnya bus yang mengangkut jemaah haji kita. Baik itu bus penjemputan dari bandara, maupun bus sholat yang mengantar jemput jemaah dari dan ke Masjidil Haram serta Armina," tegas legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari daerah pemilihan (Dapil) IX Jawa Tengah ini.

Fikri juga menekankan pentingnya seleksi ulang dan pengecekan komitmen para awak bus, demi mengutamakan keselamatan jemaah umrah.

"Seleksi ulang atau cek komitmen para awak bus, agar mengutamakan keselamatan jamaah karena mereka Dhuyufur Rahman, tamu Allah yang mesti kita muliakan dan dilayani dengan baik," pungkasnya.

Berdasarkan keterangan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah, kronologi kecelakaan maut ini bermula ketika sebuah mobil jip tiba-tiba menyalyip bus yang mengangkut 20 penumpang, termasuk dua muthawif dan perwakilan agen perjalanan.

Benturan keras tak terhindarkan, menyebabkan kedua kendaraan terguling dan terbakar. Enam jemaah umrah menjadi korban jiwa, sementara penumpang lainnya mengalami luka-luka dan segera mendapatkan perawatan medis.



"Penting untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap kondisi seluruh armada, khususnya bus yang mengangkut jemaah haji kita. Baik itu bus penjemputan dari bandara, maupun bus sholat yang mengantar jemput jemaah dari dan ke Masjidil Haram serta Armina,"

**Dr. H. ABDUL
FIKRI FAQIH, MM**

Anggota Ketua Komisi VIII DPR RI



image istimewa

Peringati Hari Internasional Melawan Islamophobia, HNW Dukung Dihadirkannya UU Anti-Islamophobia

Jakarta (15/03) — Anggota Komisi VIII DPR sekaligus Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid mengatakan agar ada makna lebih kuat dan efektivitas dari Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait memerangi Islamophobia,

maka dalam rangka memperingati Hari Internasional Memerangi Islamophobia, 15 Maret 2025, HNW mendukung bila negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) menindaklanjuti dengan menyepakati agar negara-negara anggota PBB umumnya maupun OKI

khususnya, membuat regulasi atau aturan perundangan Anti Islamophobia sebagaimana sudah dibuat UU Antisemitisme di beberapa negara.

Maka khusus untuk Indonesia, HNW mendukung prakarsa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Gerakan Nasional Anti Islamophobia (GNAI) untuk mengusulkan RUU tersebut ke DPR, dan Fraksinya, FPKS siap menyambut, mendukung dan memperjuangkannya.

"Gagasan tersebut perlu terus disuarakan dan juga direalisasikan. Apalagi untuk Indonesia, agar Indonesia sebagai salah satu negara berpenduduk mayoritas muslim terbesar di dunia juga bisa memainkan perannya dalam memerangi Islamophobia, bukan hanya di dalam negeri tetapi juga di level global. Sebagai bentuk pengamalan terhadap Konstitusi (khususnya alinea ke-4 Pembukaan UUD NRI 1945)," ujarnya melalui siaran pers di Jakarta, Jumat (14/03/2025).

HNW sapaan akrabnya mengatakan gagasan tersebut memiliki landasan yang sangat kuat, yakni Resolusi PBB pada 15 Maret 2022 yang menetapkan bahwa tanggal 15 Maret sebagai Hari Internasional dalam Memerangi Islamophobia.

"Salah satu alasan dihadapirkannya resolusi itu adalah peristiwa penembakan 51 muslim di masjid di Christchurch, Selandia Baru

pada 15 Maret 2019 lalu dan banyak peristiwa Islamophobia lainnya," ungkapnya.

Dan ternyata, lanjut HNW, sesudah peristiwa di Selandia Baru, tragedi yang menarget Islam baik simbol maupun umat Islam seperti di Eropa utara, India, Myanmar, apalagi Israel, masih terus terjadi.

"Semua komponen bangsa, terutama pemerintah, perlu sama-sama mendukung dan memperjuangkan pelaksanaan resolusi ini. Termasuk para Khotib Jumat yang kerap disarankan untuk memberikan khotbah Jumat mengenai ancaman Islamophobia ini setiap menjelang atau sesudah tanggal 15 Maret," ujarnya.

Lebih lanjut, HNW mengatakan bahwa sebagai salah satu negara mayoritas berpenduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia sebagai negara hukum dan demokratis, sudah selayaknya menjadi pionir negara-negara OKI menghadirkan regulasi/ UU Anti-Islamophobia ini.

Ia menjelaskan setidaknya ada dua materi pokok yang dapat dimasukkan ke dalam RUU atau aturan anti-Islamophobia, yakni dari segi internal dan eksternal.

HNW menjelaskan bahwa dari segi internal di level domestik Indonesia, faktanya masih banyak orang yang

Peringati Hari Internasional Melawan Islamophobia, HNW Dukung Dihadirkannya UU Anti-Islamophobia

« SEBELUMNYA

phobia terhadap konsep Islam yang Rahmatan lil alamin secara komprehensif, meskipun mereka memeluk agama Islam, akibat dari perkembangan paham sekularisme ekstrem dan liberalisme.

“Misalnya, kebencian dan penyerangan kepada simbol dan tokoh agama Islam di beberapa masjid. Selain itu, RUU ini dari sisi domestik, dapat memperkuat UU terkait, seperti UU yang mengatur harmoni kehidupan beragama dan penolakan atas penodaan agama,” ujarnya.

Sedangkan, dari sisi global, HNW menjelaskan bahwa RUU atau aturan ini dapat menjadi dasar kewenangan Pemerintah Indonesia dalam bertindak ketika terjadi perilaku Islamophobia di luar negeri.

“Misalnya, apabila terjadi kasus pembakaran Al Quran atau pelecehan Islam di luar negeri, ada semacam prosedur tetap yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Luar Negeri, untuk memanggil dan mendiskusikannya dengan Duta Besar

negara terkait, sekalipun dengan tetap menghormati kedaulatan setiap negara,” jelasnya.

HNW menyebutkan bahwa Indonesia bisa mengambil inspirasi dari RUU Memerangi Internasional Islamophobia yang sempat dibahas di Amerika Serikat.

“Salah satu aturan yang termuat dalam RUU itu adalah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Amerika Serikat untuk memonitor dan memerangi tindakan-tindakan Islamophobia di luar negeri. RUU ini sempat diusulkan pada 2021 lalu, tetapi kemudian gagal disahkan, dan kini sedang dalam proses untuk dibahas kembali. Hal serupa juga terjadi di Kanada,” papar Anggota DPR RI dari Dapil DKI Jakarta II ini.

HNW mengatakan harapan terbesar para tokoh umat tentu dihidirkannya aturan Anti-Islamophobia ini adalah dalam bentuk undang-undang. Namun, apabila hal itu sulit direalisasikan dalam waktu dekat, sementara kebutuhannya mendesak, maka ia berharap agar Presiden Prabowo dapat menghadirkan aturannya dalam bentuk peraturan presiden

(Perpres). Hal ini sejalan dengan konsep ‘ratifikasi’ suatu perjanjian internasional ke dalam hukum Indonesia yang dapat dilakukan dengan undang-undang atau perpres.

“Memang Resolusi PBB ini bukan merupakan perjanjian internasional yang memerlukan proses ratifikasi. Namun, logika dan analogi tersebut tetap dapat digunakan, terutama terkait prosedur bagi Kemlu dalam bertindak memerangi Islamophobia sebagai materi muatan Perpres,” tukasnya.

Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga berharap agar tidak ada kelompok yang ‘phobia’ terhadap gagasan RUU atau Aturan Anti-Islamophobia in karena di banyak negara barat juga ada aturan serupa, yakni UU Anti Semitisme.

“Ada banyak negara yang membuat UU Anti Semitisme (melarang ujian kebencian kepada Yahudi) itu, walau ada banyak kritikan bahwa definisinya terlalu luas karena menyangkut Negara Israel dan Zionisme yang bahkan ditolak oleh banyak warga Yahudi sendiri baik di AS maupun di Israel, apalagi karena kejahatan-kejahatan kemanusiaan Israel terhadap Gaza terutama sejak 7 Oktober 2023,” jelasnya.

“Berkaca terhadap itu, dan demi keadilan dan kemaslahatan, Indonesia sebagai anggota PBB yang menyetujui Resolusi PBB itu, sebagaimana secara



“Semua komponen bangsa, terutama pemerintah, perlu sama-sama mendukung dan memperjuangkan pelaksanaan resolusi ini. Termasuk para Khotib Jumat yang kerap disarankan untuk memberikan khotbah Jumat mengenai ancaman Islamophobia ini setiap menjelang atau sesudah tanggal 15 Maret,”

**Dr. H.M. HIDAYAT
NUR WAHID, M.A**

Anggota Komisi VIII DPR RI

terbuka dukungan itu juga disampaikan oleh Menteri Agama RI waktu itu; Yaqut Cholil Qoumas, maka seharusnya Indonesia menindaklanjuti sikap resminya dengan menghadirkan UU Anti

Islamophobia dengan cakupan yang lebih jelas, tidak multitafsir, untuk menguatkan toleransi dan harmoni kehidupan beragama di antara umat beragama,” pengukasnya.



image istimewa

Aleg PKS: Tanpa Adanya Evaluasi, Pencabutan Moratorium PMI Berisiko Tinggi

Jakarta (23/03) — Rencana pencabutan moratorium pengiriman pekerja migran ke Arab Saudi dengan kuota 600.000 pekerja dan gaji lebih dari Rp6,5 juta mendapat respon dari Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher.

"Kebijakan ini harus diawali dengan evaluasi menyeluruh terkait kesiapan sistem perlindungan bagi pekerja migran Indonesia. Saat ini masih banyak permasalahan yang belum terselesaikan dalam mekanisme penempatan pekerja migran, termasuk belum adanya evalu-

"Kita harus memastikan bahwa pekerja mendapatkan hak-hak mereka secara penuh dan bekerja dalam kondisi yang aman serta layak. Jangan sampai pencabutan moratorium ini justru membuka kembali celah eksploitasi, keterlambatan gaji, hingga kasus kekerasan yang pernah terjadi sebelumnya,"

Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si

Anggota Komisi IX DPR RI

asi terhadap Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK)," ujar Netty, Ahad, (23/03).

Selain itu, lanjutnya, hingga saat ini belum pernah ada rapat resmi antara DPR dan BP2MI untuk membahas kesiapan dan mitigasi risiko dari pencabutan moratorium ini.

"Kita harus memastikan bahwa pekerja mendapatkan hak-hak mereka secara penuh dan bekerja dalam kondisi yang aman serta layak. Jangan sampai pencabutan moratorium ini justru membuka kembali celah eksploitasi, keterlambatan gaji, hingga kasus kekerasan yang pernah terjadi sebelumnya," katanya.

Netty menyoroti berbagai bentuk kekerasan yang dialami Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Arab Saudi pada masa lalu, seperti penyiksaan fisik dan psikologis, pemerkosaan, serta

kasus pekerja yang hamil di luar pernikahan akibat kekerasan seksual, berganti majikan, bekerja pada 2-3 keluarga dan lain-lain sebagainya.

Ia menegaskan bahwa pemerintah harus memastikan adanya perjanjian bilateral yang kuat dengan Arab Saudi, sistem pengawasan yang ketat, serta mekanisme penanganan masalah yang cepat dan efektif.

"Jangan sampai kejadian lama terulang kembali. Jika ada potensi risiko tinggi bagi pekerja, maka tidak perlu buru-buru mencabut moratorium hingga sistem perlindungan benar-benar siap," tegas Netty.

Netty berkomitmen untuk terus mengawal dan memastikan bahwa kebijakan ini benar-benar membawa manfaat bagi para pekerja migran dan negara.

Aleg PKS Kurniasih Apresiasi Perusahaan yang Komitmen Tunaikan THR Pekerja Sesuai Ketentuan

Jakarta (18/03) --- Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati, mengapresiasi perusahaan-perusahaan yang memiliki komitmen memenuhi kewajiban pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Pemberian THR tepat waktu menjadi hak pekerja yang harus dipenuhi guna memastikan kesejahteraan mereka menjelang Hari Raya.

"Kami mengapresiasi perusahaan yang berkomitmen kepatuhan terhadap regulasi dengan menunaikan THR sesuai ketentuan. Hal ini menunjukkan komitmen terhadap kesejahteraan pekerja dan menjadi contoh baik bagi dunia usaha," ujar Kurniasih dalam keterangannya, Senin (17/3/2025).

Sebagaimana Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/2/HK.04.00/III/2025 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya

atau THR bagi pekerja yang menegaskan bahwa pencairan THR tersebut wajib dilakukan secara penuh atau tidak dicicil, dengan tenggat waktu H-7 Hari Raya Idul Fitri 2025.

Kurniasih juga mengingatkan, bagi pekerja yang sudah bekerja selama 12 bulan berturut-turut, besaran THR adalah satu bulan gaji. Sementara, untuk karyawan yang memiliki masa kerja minimal 1 bulan secara terus-menerus dan kurang dari 12 bulan, THR diberikan secara proporsional.

"THR bukan sekadar kewajiban, tetapi juga bentuk kepedulian kepada pekerja yang telah berkontribusi bagi

perusahaan. Kami mendorong seluruh perusahaan untuk segera menunaikan kewajiban ini sebelum batas waktu yang ditentukan," tambahnya.

Kurniasih juga meminta Kementerian Ketenagakerjaan untuk melakukan pengawasan ketat dan membuka kanal pengaduan bagi pekerja yang belum menerima haknya. Ia menegaskan bahwa pemerintah harus bertindak tegas terhadap perusahaan yang tidak menjalankan kewajibannya.

"Kami mengingatkan bahwa ada sanksi bagi perusahaan yang lalai dalam membayarkan THR, termasuk denda dan sanksi administratif. Oleh karena itu, kami harap perusahaan dapat memahami dan memenuhi kewajiban ini dengan baik," tegasnya.

Selain itu, Kurniasih juga mengimbau pekerja untuk proaktif dalam memastikan hak mereka terpenuhi dengan mencari informasi yang akurat dan melaporkan jika terdapat pelanggaran.

"Kami siap mengawal dan



"THR bukan sekadar kewajiban, tetapi juga bentuk kepedulian kepada pekerja yang telah berkontribusi bagi perusahaan. Kami mendorong seluruh perusahaan untuk segera menunaikan kewajiban ini sebelum batas waktu yang ditentukan,"

Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.

Anggota Komisi IX DPR RI

memperjuangkan hak pekerja. Kami juga meminta serikat pekerja dan masyarakat untuk

terus memantau pelaksanaan pembayaran THR agar sesuai dengan ketentuan," tutupnya.

PROGRAM UNGGULAN

FRAKSI PKS DPR RI



FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
Kecatif Atrokrakif Substantif

Parlementaria (Diskusi Publik,
PKS Legislative Corner, PKS Legislative Report,
Ruang Aleg dan Internshipsks)



Diskusi, dialog, dan kolaborasi Fraksi PKS dengan pejabat publik, pakar, ahli, tokoh CSO, dan aktivis yang kompeten serta generasi muda untuk membahas, mengkaji, dan terlibat pada isu-isu publik dari sudut pandang parlemen.

Jaga Pendidikan dari Pengaruh Negatif Medsos,

Ledia Soroti Pentingnya Kolaborasi bagi Literasi Digital Anak

Jakarta (13/03) — Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Ledia Hanifa menghadiri diskusi Dialektika Demokrasi yang diselenggarakan Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) yang bekerjasama dengan Biro Pemberitaan DPR RI.

Diskusi yang bertajuk 'Menjaga Dunia Pendidikan Dari Pengaruh Negatif Media Sosial' ini berlangsung di Ruang PPIP, Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Kamis (13/03).

Dalam diskusi ini, berbagai pihak menyoroti dampak media sosial terhadap dunia pendidikan, baik dalam aspek positif maupun negatif.

Sementara itu, Ledia Hanifa Amaliah menekankan pentingnya literasi digital sebagai bagian dari literasi yang lebih luas.

Menurutnya, literasi digital merupakan tahap ke-6 dari perkembangan literasi, dan jika literasi dasar seperti baca-tulis masih kurang baik, maka pemahaman digital pun akan

tidak optimal.

"Kita sering kali lupa untuk menggali aspek kesehatan mental anak yang sangat dipengaruhi oleh media sosial. Banyak anak mengalami tekanan psikologis hanya karena interaksi di dunia digital, seperti jumlah pengikut atau likes yang didapat. Ini menunjukkan bahwa mental anak-anak kita tidak cukup kuat menghadapi dunia digital tanpa pendampingan yang baik," ungkap Ledia.

Lebih lanjut, Ledia menyoroti perlunya pendekatan yang lebih luas dan kolaboratif dalam menangani dampak negatif media sosial.

"Kita tidak bisa hanya mengandalkan satu pihak. Pemerintah, sekolah, orang tua, dan

masyarakat harus 'keroyokan' untuk memastikan bahwa regulasi yang dibuat benar-benar bisa diterapkan dan memberikan perlindungan bagi anak-anak," tambahnya.

Dalam sesi tanya jawab, para narasumber juga membahas pentingnya pendidikan karakter dalam kurikulum serta pendekatan yang tepat bagi orang tua dalam membimbing anak menggunakan media sosial.

Menanggapi pertanyaan tentang batas usia ideal anak memiliki akun media sosial, Ledia menyebutkan bahwa sebaiknya dimulai dari usia 13 tahun, asalkan dengan pendampingan orang tua yang baik.

Diskusi ini menegaskan bahwa meskipun media sosial membawa banyak manfaat dalam dunia pendidikan, pengawasan dan kebijakan yang tepat harus diterapkan agar anak-anak terlindungi dari pengaruh negatifnya.

Pendidikan karakter, literasi digital, serta keterlibatan aktif orang tua dan pendidik menjadi



"Kita sering kali lupa untuk menggali aspek kesehatan mental anak yang sangat dipengaruhi oleh media sosial. Banyak anak mengalami tekanan psikologis hanya karena interaksi di dunia digital, seperti jumlah pengikut atau likes yang didapat. Ini menunjukkan bahwa mental anak-anak kita tidak cukup kuat menghadapi dunia digital tanpa pendampingan yang baik,"

**Hj. LEDIA HANIFA A,
S.Si., M.Psi.T**
Anggota Komisi X DPR RI

kunci utama dalam menjaga dunia pendidikan tetap aman dan kondusif di era digital ini.



image istimewa

Aleg PKS Junaidi Auly Apresiasi Komitmen Pemerintah dalam Pengembangan Ekonomi Syariah

Jakarta (11/03) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Junaidi Auly, memberikan apresiasi atas komitmen Pemerintah Indonesia dalam mendorong pengembangan ekonomi Syariah sebagai salah satu pilar utama pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif, berkelanjutan, dan tangguh terhadap krisis.

“Kebijakan ini mencerminkan langkah nyata pemerintah dalam membangun ekosistem ekonomi yang lebih stabil dan berkeadilan, serta membuka peluang bagi Indonesia untuk menjadi pusat ekonomi Syariah di tingkat global,” ujar Junaidi.

Lebih lanjut, Junaidi menekankan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo harus terus

melanjutkan komitmen dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan Syariah di berbagai sektor.

“Salah satu langkah strategis yang perlu segera diwujudkan adalah penguatan regulasi yang dapat menjadi payung hukum dalam penyusunan kebijakan pemerintah untuk mendukung aktivitas ekonomi Syariah serta memperbesar dampak sosio-ekonomi dalam perekonomian nasional,” ujar Junaidi.

Sebagai langkah konkret, Junaidi mengharapkan DPR RI mendorong Pemerintah untuk segera membahas RUU Ekonomi Syariah dan memasukkannya dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2026. Sebelumnya, RUU tersebut telah disetujui masuk dalam Longlist Prolegnas 2025-2029.

“Kebijakan ini mencerminkan langkah nyata pemerintah dalam membangun ekosistem ekonomi yang lebih stabil dan berkeadilan, serta membuka peluang bagi Indonesia untuk menjadi pusat ekonomi Syariah di tingkat global,”

Dr. Ir. H. A. JUNAIDI AULY, M.M.

Anggota Komisi XI DPR RI

Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya transformasi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) menjadi sebuah badan khusus dengan kewenangan lebih luas untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi Syariah di Indonesia.

Dukungan terhadap transformasi ini, imbuhnya, dinilai krusial mengingat tren positif ekonomi dan keuangan Syariah dalam lima tahun terakhir. Saat ini, Indonesia menempati peringkat ketiga secara global berdasarkan Global Islamic Economy Indicator (GIEI), setelah Malaysia dan Arab Saudi.

“Peringkat ini mencerminkan potensi besar yang harus terus diperkuat agar Indonesia dapat menjadi pemimpin dalam ekonomi Syariah dunia,” pungkas Junaidi, yang juga merupakan anggota Komisi XI DPR RI.



Kinerja APBN Januari 2025 Tertekan,

Komisi XI FPKS Anis Byarwati: Perlu Ditingkatkan

Jakarta (14/03) — Setelah ditunggu sekian lama, akhirnya Kementerian Keuangan mengumumkan kinerja APBN sampai dengan Februari 2025. Biasanya penyampaian laporan kinerja APBN secara bulanan tidak jauh dari selesainya periode satu bulan.

Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS Anis Byarwati menyebut penyampaian APBN Januari 2025, mengalami keterlambatan lebih dari satu bulan.

"Kondisi tersebut, tentu menimbulkan tanda tanya bagi masyarakat, apa yang sedang terjadi dengan kondisi APBN Januari 2025," katanya di Jakarta (14/03/2025).

Menurut Anis, pertanyaan publik tersebut akhirnya terjawab, kondisi APBN Januari hingga Februari 2025 tidak seperti biasanya, mengalami kontraksi baik dari sisi penerimaan maupun belanja negara.

"Sejak awal Kementerian Keuangan harus mencegah pelepasan defisit APBN 2025 dari target, menyusul tren

penurunan penerimaan pajak, dan belanja yang tinggi, sehingga tidak menambah beban APBN ke depan," ungkapnya.

Anggota Komisi XI DPR RI ini menyampaikan penerimaan perpajakan Januari 2025, terdiri atas Penerimaan Pajak senilai Rp88,89 triliun, 4,06% dari target atau turun 41,86% (yoy).

"Sementara Penerimaan Kepabeanaan dan Cukai Rp26,29 triliun yang mencapai 8,72% dari target tercatat mengalami peningkatan sebesar 14,75%. Sedangkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tercatat telah masuk senilai Rp42,13 triliun atau 8,2% dari target atau turun 3,03% (yoy). Kemudian Penerimaan Hibah senilai Rp9,8 miliar," ujarnya.

Dari sisi belanja, sampai dengan Januari 2025, belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp86,04 triliun mengalami penurunan 10,75% dibandingkan tahun sebelumnya (yoy).

Terdiri atas realisasi Belanja K/L Rp24,38 triliun atau turun sebesar 45,5% dan realisasi Belanja non-K/L Rp61,66 triliun meningkat 19,43% (yoy). Sedangkan belanja melalui Transfer ke Daerah (TKD) mencapai Rp94,73 triliun.

Legislasi Perempuan PKS ini menyebut posisi belanja yang lebih besar dari pendapatan membuat APBN Januari 2025 mengalami defisit. Defisit anggaran pada Januari 2025 tercatat senilai Rp23,5 triliun atau 0,10% terhadap PDB.

"Posisinya berbalik jika dibandingkan dengan Januari 2024 ketika APBN mengalami surplus Rp35,1 triliun atau 0,16% terhadap PDB. Kondisi ini kali pertama APBN mengalami defisit lagi pada Januari. Padahal, pada 2022 hingga 2024 APBN masih mengalami surplus pada bulan pertama," katanya.

Anggota Fraksi PKS ini menyampaikan bahwa angka defisit ini kemudian menyebabkan pembiayaan anggaran pada Januari 2025 tercatat senilai Rp154 triliun atau meningkat sebesar 43,5% dari realisasi pembiayaan anggaran Januari 2024 senilai Rp107,3 triliun. Keseimbangan primer APBN Januari 2025 tercatat senilai Rp10,61 triliun, jumlahnya



"Beberapa kebijakan seperti Coretax, Kebijakan terhadap PPN, diduga mempengaruhi kinerja APBN. Oleh sebab itu, Kemenkeu dan kementerian terkait perlu lebih waspada dan hati-hati dalam merumuskan kebijakan yang memberikan dampak terhadap kondisi perekonomian,"

**Dr. Hj. ANIS BYARWATI,
S.Ag.,M.Si**

Anggota Komisi XI DPR RI

turun 83,7% (yoy) dari posisi keseimbangan primer Januari 2024 senilai Rp65,25 triliun.

Anis mengingatkan walaupun kinerja APBN sampai dengan Januari 2025 masih berada dalam frame APBN 2025, namun tekanan terhadap APBN di awal tahun harus tetap diwaspadai.

"Beberapa kebijakan seperti Coretax, Kebijakan terhadap PPN, diduga mempengaruhi kinerja APBN. Oleh sebab itu, Kemenkeu dan kementerian terkait perlu lebih waspada dan hati-hati dalam merumuskan kebijakan yang memberikan dampak terhadap kondisi perekonomian," serunya.

Aleg PKS Nevi Zuairina : Pastikan Pasokan BBM dan LPG Aman Selama Lebaran

Jakarta (15/03) — Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PKS, Nevi Zuairina meminta Pertamina memastikan kelancaran distribusi bahan bakar minyak (BBM) dan LPG 3 kg menjelang dan selama perayaan Hari Raya Idul Fitri.

Menurutnya, kelancaran pasokan energi ini sangat vital mengingat tingginya mobilitas masyarakat pada periode mudik Lebaran.

"Pertamina perlu memastikan semua jenis BBM seperti Pertalite, Pertamax, Solar, serta LPG subsidi 3 kg tersedia secara aman dan merata, terutama di wilayah yang menjadi tujuan utama mudik masyarakat," ujar Nevi.

Nevi menyebutkan, berdasarkan kunjungan kerja Komisi XII ke Terminal BBM Pertamina di Cikampek baru-baru ini, kondisi stok BBM maupun LPG saat ini dinilai aman. Pertamina telah menyiapkan stok BBM dengan ketahanan 18-20 hari serta LPG nasional dengan stok rata-rata mencapai 15,2 hari.

Namun demikian, politisi PKS ini menekankan pentingnya antisipasi ekstra mengingat lonjakan konsumsi yang diprediksi akan terjadi saat Lebaran.

"Kita tahu bahwa kebutuhan BBM seperti Pertalite diperkirakan naik 11,4 persen, Pertamax naik hingga 16,9 persen, sementara konsumsi Biosolar turun 13,4 persen selama periode ini. Karenanya, stok tambahan sejak jauh-jauh hari serta kelancaran distribusi di lapangan mutlak harus dijaga dengan baik," jelasnya.

Nevi juga mengingatkan Pertamina agar memperhatikan kendala operasional yang mungkin terjadi, seperti kemacetan lalu lintas selama mudik, yang bisa

memperlambat distribusi ke SPBU maupun agen LPG.

Selain itu, aspek keselamatan dan keamanan dalam operasional Terminal BBM juga menjadi perhatian utama. Ia mengapresiasi langkah-langkah yang telah diterapkan Pertamina dalam menjaga kualitas dan keselamatan penyimpanan serta distribusi BBM.

"Kami dari Fraksi PKS akan terus memonitor dan mendorong agar Pertamina dan seluruh pihak terkait, termasuk PLN, selalu siap dengan skenario darurat jika terjadi hambatan distribusi, agar masyarakat dapat merayakan Lebaran dengan tenang," tutur Nevi.

Nevi berharap koordinasi Pertamina dengan pihak terkait seperti pemerintah daerah dan aparat keamanan terus ditingkatkan.

"Semua upaya ini dilakukan untuk memastikan kenyamanan dan keamanan masyarakat selama periode mudik dan perayaan Idul Fitri," tutupnya.



"Kita tahu bahwa kebutuhan BBM seperti Pertalite diperkirakan naik 11,4 persen, Pertamax naik hingga 16,9 persen, sementara konsumsi Biosolar turun 13,4 persen selama periode ini. Karenanya, stok tambahan sejak jauh-jauh hari serta kelancaran distribusi di lapangan mutlak harus dijaga dengan baik,"

Hj. NEVI ZUAIRINA

Anggota Komisi XII DPR RI



image istimewa

Sayangkan Peristiwa Lapas Kota Kutacane Aceh, Aleg PKS Serukan Perbaikan Menyeluruh Semua Lapas di Tanah Air

Jakarta (13/03) — Peristiwa kaburnya 50 tahanan di lapas kota Kutacane, Provinsi Aceh pada (10/03) lalu, begitu menghebohkan. Menanggapi hal tersebut, Anggota Legislatif DPR-RI Fraksi PKS, Sohibul Iman menyatakan dirinya amat menyayangkan peristiwa ini bisa terjadi.

Menurutnya, apa yang terjadi di lapas Kutacane ini tidak terlepas tentang bagaimana pengelolaan sebuah lapas yang baik. Dan ini juga menunjukkan betapa pentingnya pengelolaan lapas di seluruh penjuru tanah air, termasuk hal-hal mendasar seperti keterisian yang seharusnya tidak melebihi batas kapasitasnya.

"Tidak bisa dipungkiri, bahwa salah satu penyebab sulitnya pengelolaan lapas kita adalah kondisi huniannya yang rata-rata melebihi kapasitas, termasuk juga yang terjadi di lapas Kutacane ini," ungkap Sohibul Iman.

Lebih lanjut lagi, pria yang kerap disapa dengan 'MSI' ini menyebutkan, bahwa hal tersebut tidaklah menjadi satu pembenaran akan lemahnya pengawasan di dalam lapas.

Menurutnya, pihak lapas harus selalu menyadari akan pentingnya pengetatan dalam pengawasan yang dilakukan, terlebih adanya fakta bahwa memang terjadi yang namanya over capacity.

"Tetapi tentu hal tersebut tidak boleh menjadi alasan pembenar dalam lemahnya pengawasan didalam lapas tersebut. Pengelola lapas harus

Pihak lapas harus selalu menyadari akan pentingnya pengetatan dalam pengawasan yang dilakukan, terlebih adanya fakta bahwa memang terjadi yang namanya over capacity. Tetapi tentu hal tersebut tidak boleh menjadi alasan pembenar dalam lemahnya pengawasan didalam lapas tersebut.

MOHAMAD SOHIBUL IMAN, M.Eng., Ph.D.

Anggota Komisi XIII DPR RI

setiap saat menyadari adanya masalah kelebihan penghuni ini, sehingga (mereka) selalu berusaha melakukan upaya pengawasan yang lebih ketat".

Sohibul Iman menyebutkan bahwa sudah sepatutnya perlu dilakukan peningkatan terhadap kapasitas lapas, yang juga harus dibarengi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang mengelola lapas.

"Selanjutnya, dalam jangka menengah dan panjang, perlu dilakukan peningkatan kapasitas lapas di seluruh Indonesia. Yang tentu itu saja tidak cukup. Harus disertai dengan kualitas SDM pengelola lapasnya. Kita perlu belajar dari negara-negara yang dikenal sangat baik dalam pengelolaan lapas (prison management)", tutup pria kelahiran Tasikmalaya tersebut.

Komisi XIII FPKS Sohibul Iman Pertanyakan Indikator Indeks Kesadaran Hukum dan HAM Masyarakat

Jakarta (19/03) — Anggota Legislatif DPR RI dari Fraksi PKS, Mohamad Sohibul Iman, mengkritisi capaian kinerja Kementerian Hukum dan HAM tahun anggaran 2024,

khususnya terkait sasaran strategis peningkatan kesadaran hukum dan HAM masyarakat, dalam rapat Komisi XIII DPR RI dengan Kementerian Hukum.

Dalam rapat tersebut, Sohibul Iman menyoroti ketidaksesuaian antara indikator-indikator yang digunakan dalam pengukuran indeks kesadaran hukum dan HAM masyarakat.

Menurut Sohibul Iman, sasaran strategis kedua yang berfokus pada reformasi birokrasi dengan indikator komposit indeks reformasi birokrasi dinilai sudah sesuai dan memiliki keterkaitan yang kuat. Namun, ia mempertanyakan relevansi indikator-indikator yang digunakan dalam sasaran strategis pertama, yaitu indeks kesadaran hukum dan HAM masyarakat

“Saya mencoba memahami kedua sasaran strategis ini

dari indikator-indikator yang ada.

Untuk sasaran strategis kedua, saya rasa indikatornya cukup nyambung, tetapi untuk sasaran pertama, saya melihat ada ketidaksesuaian antara indikator yang digunakan dengan tujuan yang ingin dicapai,” ujar Sohibul Iman dalam rapat komisi XIII.

Ia menyoroti bahwa seharusnya indeks kesadaran hukum dan HAM masyarakat diukur berdasarkan kondisi yang ada di masyarakat, bukan semata-mata pada aspek internal pemerintahan. Beberapa indikator yang digunakan, seperti indeks kualitas peraturan perundang-undangan dan indeks efektivitas otoritas pusat, dinilai lebih mencerminkan kinerja pemerintahan daripada tingkat kesadaran hukum masyarakat.

“Ketika kita berbicara tentang indeks kesadaran hukum dan HAM masyarakat, yang harus diukur adalah indikator yang mencerminkan pemahaman dan kepatuhan hukum masyarakat. Namun, yang saya lihat, justru indikatornya lebih banyak berkaitan dengan produk yang dibuat oleh Kementerian Hukum dan DPR, seperti kualitas peraturan perundang-undangan. Saya belum bisa memahami bagaimana hal ini bisa menjadi ukuran kesadaran hukum masyarakat,” tambah adeg kelahiran Tasikmalaya tersebut.

Sohibul Iman pun meminta penjelasan dari pihak yang berwenang dalam Kementerian Hukum mengenai hal ini. Ia berharap ada klarifikasi dan penyesuaian indikator agar lebih mencerminkan kondisi nyata di masyarakat.

“Saya berharap ada penjelasan yang lebih rinci terkait hal ini, karena saya melihat ada gap antara tujuan dan cara pengukurannya. Kita perlu memastikan bahwa indeks kesadaran



“Saya berharap ada penjelasan yang lebih rinci terkait hal ini, karena saya melihat ada gap antara tujuan dan cara pengukurannya. Kita perlu memastikan bahwa indeks kesadaran hukum dan HAM benar-benar merefleksikan kondisi masyarakat, bukan hanya internal kementerian,”

MOHAMAD SOHIBUL IMAN, M.Eng., Ph.D.

Anggota Komisi XIII DPR RI

hukum dan HAM benar-benar merefleksikan kondisi masyarakat, bukan hanya internal kementerian,” tegasnya.

Dengan kritik yang disampaikan oleh Sohibul Iman ini, diharapkan Kementerian

Hukum dapat melakukan evaluasi terhadap indikator-indikator yang digunakan sehingga kebijakan yang diambil dapat lebih akurat dan tepat sasaran dalam meningkatkan kesadaran hukum dan HAM di masyarakat.



image istimewa

Tiga Anak Jadi Korban Oknum Aparat Hukum Pengguna Narkoba, Aleg PKS Meity Mengaku Prihatin dan Minta Ditindak Tegas

Makassar (17/03) -- Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PKS, Meity Rahmatia turut prihatin dan sedih mendengar peristiwa pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur oleh oknum aparat, eks Kapolres Ngada, Nusa Tenggara Timur.

Politisi asal Sulawesi Selatan itu menyampaikan rasa dukanya kepada media. Meity tak habis pikir, seorang oknum yang harusnya menjadi pengayom masyarakat, justru menjadi pelaku kejahatan.

"Benar-benar tidak punya rasa perikemanusiaan dan

belas kasihan pada anak-anak," ungkapnya dengan nada miris.

Kasus yang juga dibongkar sendiri oleh pihak kepolisian tersebut, menurut Meity terindikasi karena adanya pengaruh Narkoba.

"Kepolisian menemukan bukti, tersangka menggunakan Narkoba. Ya, kita tahu dampak barang haram tersebut pada penggunaannya. Mereka kehilangan kesadaran sehingga bisa berbuat kejahatan apapun," tambahnya.

Meity mengapresiasi kinerja kepolisian yang bergerak cepat mengungkap kasus yang tengah viral di berbagai platform media sosial ini. Ia berharap pelaku dihukum seberat-beratnya.

"Semoga mendapat sanksi yang berat karena melakukan kejahatan atau tindak pidana berlapis. Dia seorang pimpinan di institusi hukum tapi

"Kepolisian menemukan bukti, tersangka menggunakan Narkoba. Ya, kita tahu dampak barang haram tersebut pada penggunaannya. Mereka kehilangan kesadaran sehingga bisa berbuat kejahatan apapun,"

Hj. MEITY RAHMATIA, S.Pd., S.E., M.M.

Anggota Komisi XIII DPR RI

melakukan kejahatan berupa tindak asusila kepada anak-anak," terangnya.

Meity juga mencermati penyalahgunaan Narkoba oleh eks Kapolres Ngada dalam kasus ini.

"Itu indikasi Indonesia memang darurat Narkoba. Aparat hukum yang kita harap memberantas Narkoba, justru dia penggunaannya. Ya, walau itu disebut oknum," jelasnya.

Meity yang dalam beberapa waktu terakhir aktif menyambangi lembaga pemasyarakatan memandang Narkoba sangat berbahaya dan berpengaruh besar terhadap pembangunan.

"Mayoritas penghuni Lapas karena kasus Narkoba. Entah itu pemakai, pengedar dan bandar," ungkapnya menutup keterangannya pada media.



image istimewa

Aleg PKS Hamid Noor Yasin Soroti Lonjakan Pendapatan GBK dan Kemayoran

Jakarta (14/03) --- Anggota Komisi XIII DPR RI dari Partai Keadilan Sejahtera Hamid Noor, menyoroti peningkatan signifikan pendapatan non-pajak (PNBP) dari pengelolaan aset negara, khususnya kawasan Gelora Bung Karno (GBK) dan Kemayoran,

dalam Rapat Kerja dengan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg) pada Kamis, 13 Maret 2025.

Dalam rapat tersebut, Hamid Noor Yasin mengungkapkan bahwa pendapatan dari pengelolaan aset negara mengalami lonjakan drastis hingga

“Jika lonjakan ini merupakan hasil strategi yang matang, maka ini bisa menjadi model pengelolaan aset negara yang baik bagi kementerian dan lembaga lainnya. Namun, jika target awal memang dibuat terlalu rendah, maka perlu ada evaluasi dalam proses perencanaannya,”

Drs. HAMID NOOR YASIN, M.M.

Anggota Komisi XIII DPR RI

170,71% dari target yang ditetapkan.

“Dari target awal sebesar Rp470,3 miliar, realisasi pendapatan non-pajak mencapai Rp83,09 miliar,” ungkapnya.

Hamid mengapresiasi pencapaian ini, tetapi juga mempertanyakan apakah kenaikan tersebut merupakan hasil dari perencanaan yang matang atau akibat dari target awal yang terlalu rendah.

“Jika lonjakan ini merupakan hasil strategi yang matang, maka ini bisa menjadi model pengelolaan aset negara yang baik bagi kementerian dan lembaga lainnya. Namun, jika target awal memang dibuat terlalu rendah, maka perlu ada evaluasi dalam proses perencanaannya,” ujar Hamid Noor.

Ia menekankan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset negara harus menjadi prioritas utama.

Selain itu, ia juga meminta Kemensesneg untuk memberikan penjelasan lebih lanjut terkait strategi yang diterapkan sehingga pendapatan dari pengelolaan aset negara dapat meningkat secara signifikan.

Rapat kerja ini merupakan bagian dari upaya DPR dalam memastikan tata kelola aset negara lebih transparan dan efektif, serta dapat menjadi contoh bagi kementerian dan lembaga lain dalam mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki negara.

“Perlu transparansi dan akuntabilitas dalam setiap pengelolaan aset negara”, tegas pria yang juga disapa akrab HNY tersebut.

Ke depan, Komisi XIII DPR RI akan terus mengawal kebijakan pengelolaan aset negara agar lebih optimal dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi negara dan masyarakat.



**Follow
Akun tiktok
Fraksi PKS DPR RI**

@fraksipksdprri



Selain Mengutuk Keras, Ketua BKSAP Mardani Ali Sera Desak Dunia Segera Hentikan Kebrutalan Israel

Jakarta (19/03) --- Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, mengutuk keras serangan udara masif Israel atas Jalur Gaza.

Ia mendesak komunitas global bertindak konkret untuk menghentikan serangan sangat kejam Israel itu.

Pasalnya, ujar Mardani, saat warga Gaza kelaparan dan kebutuhan dasar lainnya sangat minim, Israel merudal Gaza yang dalam satu hari kemarin (18/3) menewaskan 429 orang termasuk anak-anak.

Pria asli Betawi itu juga menilai ulah Israel itu harus segera dihentikan.

"Sejak dua pekan memblokir akses masuk bantuan kemanusiaan ke Gaza, menunda-nunda kesepakatan gencatan senjata, Israel malah terus menggenosida warga Gaza. Ini jelas tidak bisa diterima, terkutuk, dan harus segera dihentikan. Komunitas internasional terutama Dewan Keamanan PBB harus segera mengambil langkah konkret," desak Mardani.

Jika hanya dikutuk, lanjut Mardani, dipastikan Israel akan terus melangsungkan aksi brutalnya.

"Dunia tidak boleh diam seribu bahasa. Sekarang juga harus bertindak. Ini

menyangkut banyak hal.

Pertama, nyawa dua jutaan warga Gaza termasuk anak-anak, perempuan, dan juga tawanan Israel," ujarnya.

Kedua, lanjut Mardani, kredibilitas PBB sebagai wadah penyelesaian masalah warga dunia.

"Ketiga, ini akan menyulut aksi-aksi unilateral yang berdampak ke kawasan dan global termasuk eskalasi di Laut Merah," imbuh Mardani menjelaskan.

Pada sisi lain, legislator

Komisi II itu mengajak dunia untuk melawan arogansi AS yang terus membela Israel.

"Ini momen tepat untuk melawan keberpihakan AS kepada Israel yang tanpa syarat. Karena AS saat ini tengah melakukan perang dagang bahkan dengan sekutu-sekutu dekatnya seperti Eropa," imbuhnya.

Terkait peran BKSAP DPR untuk menghentikan genosida di Gaza, Mardani mengaku akan membawa isu ini ke forum parlemen global.

"Awal April mendatang kami akan menghadiri sidang umum Inter-Parliamentary Union Uzbekistan. Kami tengah menjajaki dengan negara-negara like minded untuk meloloskan resolusi emergency item untuk menyerukan aksi nyata menghentikan kejahatan Israel," pungkas dia.

"Sejak dua pekan memblokir akses masuk bantuan kemanusiaan ke Gaza, menunda-nunda kesepakatan gencatan senjata, Israel malah terus menggenosida warga Gaza. Ini jelas tidak bisa diterima, terkutuk, dan harus segera dihentikan. Komunitas internasional terutama Dewan Keamanan PBB harus segera mengambil langkah konkret,"

Dr. H. MARDANI, M.Eng
Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI

BAKN DPR FPKS Dorong Pemerintah Bertindak Cepat Atasi Defisit APBN dan Krisis Penerimaan Pajak

Jakarta (15/03) — Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI dari Fraksi PKS, Amin Ak menyoroti kondisi keuangan negara yang mengkhawatirkan.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan mengumumkan defisit APBN sebesar Rp 31,3 triliun per Februari 2025.

Defisit awal tahun ini menjadi yang pertama dalam empat tahun terakhir, terutama akibat anjloknya penerimaan pajak hingga 41,86% dibandingkan tahun sebelumnya.

"Kami sangat prihatin dengan tren fiskal ini. Turunnya penerimaan pajak secara drastis bukan hanya mengancam keberlanjutan anggaran negara. Tetapi juga bisa berdampak luas pada perekonomian nasional, stabilitas nilai tukar, dan kepercayaan investor," ujar Wakil Ketua Fraksi PKS ini.

Menteri Keuangan menyebut salah satu penyebab utama penurunan pajak adalah gangguan teknis pada sistem Coretax yang menghambat proses administrasi pajak.

Menurut Amin, masalah ini tidak boleh dianggap remeh dan harus segera ditangani dengan langkah konkret.

"Kalau sistem perpajakan baru justru menyebabkan penerimaan negara terjun bebas, ini tanda bahwa ada kesalahan serius dalam perencanaannya. Pemerintah harus segera memastikan Coretax bisa berjalan optimal. Kalo tidak, pemerintah harus menyiapkan mekanisme darurat agar pengumpulan paj-

ak tidak terus terganggu," tegasnya.

Di sisi lain, rendahnya penerimaan pajak juga mencerminkan perlambatan ekonomi yang berimbas pada pajak korporasi dan PPN. Jika situasi ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin defisit APBN akan melampaui target Rp 612,2 triliun (2,53% dari PDB) tahun ini.

Selain itu, keterlambatan rilis laporan APBN bulan Januari-Februari 2025 juga menimbulkan kekhawatiran tentang transparansi pengelolaan fiskal.

Menurut Anggota Komisi VI DPR RI ini, keterbukaan data keuangan negara sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik dan investor.

"Kita tidak ingin ada spekulasi negatif akibat keterlambatan informasi. Menteri Keuangan harus lebih transparan dan responsif dalam menyampaikan kondisi fiskal negara agar pasar dan dunia usaha dapat mengantisipasi risiko dengan baik," katanya.

BAKN DPR RI berkomitmen untuk mengawal kebijakan ekonomi nasional agar tetap berada di jalur yang sehat dan berkelanjutan.

"Kami akan terus mengawasi dan memberikan masukan kepada pemerintah agar kebijakan fiskal kita tidak hanya sekadar memenuhi target angka. Tetapi benar-benar memperkuat ekonomi nasional secara menyeluruh," pungkasnya



"Kita tidak ingin ada spekulasi negatif akibat keterlambatan informasi. Menteri Keuangan harus lebih transparan dan responsif dalam menyampaikan kondisi fiskal negara agar pasar dan dunia usaha dapat mengantisipasi risiko dengan baik,"

AMIN AK, M.M.

Anggota Badan Akuntabilitas
Keuangan Negara DPR RI



image istimewa

Perkuat Tata Kelola Pertahanan Negara yang Lebih Adaptif dan Efektif, Fraksi PKS Setujui Revisi UU TNI

Jakarta (19/03) -- Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS Idrus Salim Al-Jufri membacakan pandangan mini Fraksi PKS soal Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang menjadi perhatian utama dalam upaya memperkuat tata kelola pertahanan negara yang lebih adaptif dan efektif.

Menurut pria yang akrab disapa Habib Idrus, Empat pasal utama yang mengalami perubahan, yakni kedudukan TNI, tugas pokok TNI dalam Operasi Militer Selain Perang, penempatan prajurit pada Kementerian/ Lembaga, serta usia masa dinas keprajuritan TNI, mencerminkan urgensi penyesuaian terhadap dinamika strategis dan tantangan pertahanan nasional.

"Fraksi PKS DPR RI memandang bahwa revisi ini telah menyerap aspirasi dari masyarakat, berlandaskan pada prinsip supremasi sipil, profesionalisme TNI, serta kepastian hukum yang jelas dalam menjaga stabilitas dan keamanan nasional," jelasnya.

Oleh karena itu, lanjut Habib Idrus, Fraksi PKS DPR RI memberikan pandangan komprehensif terkait dengan substansi perubahan dalam revisi ini, termasuk implikasi dan langkah-langkah yang perlu diambil guna memastikan

implementasi kebijakan yang selaras dengan kepentingan nasional.

"Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI memandang revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) sebagai langkah penting untuk menyesuaikan regulasi dengan perkembangan organisasi TNI dan dinamika pertahanan negara," terang Anggota DPR RI dari Dapil Banten III ini.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI, kata Habib Idrus, memberikan pandangan yakni

Pertama, kedudukan TNI. "Fraksi PKS DPR RI menyambut baik penegasan bahwa TNI tetap berada di bawah Presiden dalam pengerahan dan penggunaan kekuatan militer. Kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan

Perkuat Tata Kelola Pertahanan Negara yang Lebih Adaptif dan Efektif, Fraksi PKS Setujui Revisi UU TNI

« SEBELUMNYA

administrasi yang berkaitan dengan aspek perencanaan strategis TNI, berada di dalam koordinasi Kementerian Pertahanan merupakan langkah positif dalam memperjelas koordinasi dan kendali sipil terhadap TNI," papar Habib Idrus.

Fraksi PKS DPR RI, lanjutnya, menekankan bahwa revisi UU ini harus tetap berpegang pada prinsip supremasi sipil serta profesionalisme TNI dalam menjaga kedaulatan negara.

"Kedua, tugas pokok TNI dan Operasi Militer Selain Perang. Fraksi PKS DPR RI mendukung penuh penambahan tugas

pokok baru TNI dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP), yakni melindungi WNI di luar negeri dan pertahanan siber," sebut Habib Idrus.

Fraksi PKS DPR RI, imbuhnya, melihat bahwa tantangan keamanan kontemporer semakin kompleks, terutama dalam aspek keamanan siber dan perlindungan WNI di luar negeri. Oleh karena itu, Fraksi PKS DPR RI menegaskan pentingnya kesiapan TNI dalam menghadapi ancaman non-tradisional tanpa mengesampingkan koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait seperti Polri dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) agar tidak ter-

jadi tumpang tindih kewenangan.

"Ketiga, penempatan prajurit pada Kementerian/Lembaga. Fraksi PKS DPR RI memandang bahwa prajurit yang bertugas di luar Kementerian/Lembaga yang dimaksud dalam RUU harus mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif," pungkasnya.

Keempat, terang Habib Idrus, usia masa dinas keprajuritan. Fraksi PKS DPR RI memahami bahwa upaya mempertahankan pengalaman serta stabilitas kepemimpinan di tubuh TNI merupakan hal penting dalam menjaga organisasi.

"Fraksi PKS DPR RI mendukung penambahan usia masa dinas keprajuritan TNI dengan diiringi sistem regenerasi yang baik agar tidak menghambat karier perwira muda serta tidak menyebabkan stagnasi dalam organisasi TNI," jelas Habib Idrus.

"Berdasarkan hal-hal yang telah kami sampaikan, dengan memperhatikan aspirasi masyarakat, mengedepankan prinsip supremasi sipil, profesionalisme TNI, serta efisiensi dalam pengelolaan pertahanan negara, seraya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Fraksi PKS DPR RI menyatakan menyetujui Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan untuk selanjutnya dapat segera



penempatan prajurit pada Kementerian/Lembaga. Fraksi PKS DPR RI memandang bahwa prajurit yang bertugas di luar Kementerian/Lembaga yang dimaksud dalam RUU harus mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif,"

HABIB IDRUS SALIM ALJUFRI, Lc., M.B.A.

Anggota Komisi I DPR RI



image istimewa



Dapil Jawa Timur VIII
Meliputi Jombang, Madiun,
Mojokerto, dan Nganjuk



Tanggal Lahir :
3 Mei 1994



Keluarga
Suami : Sugih Laksana Futra
Anak: 1



Pendidikan
• SDN Nagasari VII Karawang
(2000-2006)
• SMPN 2 Karawang Barat
(2006-2009)
• SMAN 5 Karawang
(2009-2012)
• S1: Ilmu Hukum, Universitas Surabaya
(2012-2017)



Pekerjaan
• Manager Marketing,
PT. Agrodana Future Indonesia (2017-2018)
• Direktur Operasional,
PT. Trigunapratama Abadi (2018-2019)
• Anggota DPRD Kabupaten Karawang (2019-2023)
• Anggota DPR RI (2024-2029)



Riwayat Organisasi
• Sekretaris Keputrian, Unit Kegiatan Kerohanian Islam
Universitas Surabaya/ UKKI UBAYA (2013-2016)
• Dewan Penasihat Pemuda Pancasila (2021-2022)
• Ketua DPC Partai Hanura (2019-2023)



Sosial Media
• Facebook
meitricitrawardani
• Instagram
meitricitrawardani
• Tiktok
meitricitrawardani



Hj.

**Meitri
Citra
Wardani**

SH



Bersama PIP PKS Malaysia, Kurniasih Bagikan Takjil Bergizi Gratis untuk PMI dan Masyarakat Indonesia

Jakarta (29/11) — Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS Ateng Sutisna merespon rencana Wamen ATR/Waka BPN, Ossy Dermawan yang akan melakukan legalitas tanah perkebunan sawit, bila lahan itu tidak termasuk kawasan hutan.

Kegiatan ini dilakukan oleh Pusat Informasi dan Pelayanan (PIP) PKS Malaysia di Kuala Lumpur.

Kurniasih mengatakan, meski belum bisa datang secara langsung ke Malaysia dirinya berharap, ikatan kekeluargaan dari Tanah Air bisa sampai ke

“Bulan Ramadan adalah momen penuh berkah dan kepedulian. Kami ingin memastikan bahwa saudara-saudara kita di Malaysia, terutama para pekerja migran, dapat merasakan kebersamaan dan perhatian melalui kegiatan berbagi ini,”

**Dr. Hj. KURNIASIH
MUFIDAYATI, M.Si.**

Anggota Komisi IX DPR RI

masyarakat yang tengah berjuang merantau di Malaysia.

Pembagian takjil ini merupakan bentuk kepedulian terhadap PMI dan masyarakat Indonesia di Malaysia yang tengah menjalankan ibadah puasa jauh dari kampung halaman. Dengan menyediakan takjil yang bergizi, diharapkan dapat membantu mereka dalam menjalankan ibadah dengan lebih baik sertaempererat solidaritas di antara sesama perantau.

“Bulan Ramadan adalah momen penuh berkah dan kepedulian. Kami ingin memastikan bahwa saudara-saudara kita di Malaysia, terutama para pekerja migran, dapat merasakan kebersamaan dan perhatian melalui kegiatan berbagi ini,” ujar Kurniasih Mufidayati.

Kurniasih berterima kasih kepada Ketua PIP PKS Malaysia Ali Sophian dan jajaran yang

membantu menyalurkan program Berbagi Takjil Bergizi yang merupakan program DPP PKS pada Ramadhan 1446 H ini.

Ketua PIP PKS Malaysia Ali Sophian sebagai pelaksana kegiatan ini turut menyampaikan bahwa antusiasme masyarakat sangat tinggi terhadap kegiatan ini. Mereka merasa terbantu dan mengapresiasi inisiatif ini sebagai bentuk kepedulian yang nyata terhadap kondisi PMI dan masyarakat Indonesia di luar negeri.

“Selain pembagian takjil, kegiatan ini juga menjadi ajang silaturahmi dan penguatan kebersamaan bagi komunitas Indonesia di Malaysia,” kata dia.

Ali berharap kegiatan serupa dapat terus dilakukan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia yang tinggal dan bekerja di luar negeri.



image istimewa

Silaturahmi dengan Baleg DPR RI, Himpauadi Riau Perjuangkan Kesetaraan Guru PAUD

Pekanbaru (17/03) -- Pengurus Himpauadi Riau bersilaturahmi dengan H. Hendry Munief, SE, Ak, MBA, salah seorang anggota Badan Legislati (Baleg) DPR/MPR RI, bertempat di Hasanah Guest House, jalan Paus Pekanbaru. Jumat (14/03/2025)

Dalam kunjungan itu, Ketua Himpauadi Riau, Hj. Aida Malikha, S. Psi, MSi, Psikolog, memimpin rombongan, turut hadir mendampingi beliau diantaranya, Fernandez, Supreh, Susi Herlinda, Witrayeni, Mashati, Lisia Karmila, Badriyah dan Yenzen.

Disebutkan Aida, saat ini Himpauadi berbagai tingkatan mulai dari Pengurus Pusat (PP) Himpauadi hingga Pengurus Wilayah (PW) Himpauadi giat giatnya memperjuangkan kesetaraan guru PAUD non formal dengan guru PAUD formal.

Lanjut Aida, Pengurus PP Himpauadi dan PW telah melakukan rapat zoom meeting membahas mengenai ketidaksetaraan guru PAUD non formal dengan guru PAUD formal.

Kemudian pada tanggal 8 maret lalu, PP Himpauadi telah melakukan audiensi dengan komisi X DPR RI terkait memperjuangkan kesetaraan guru PAUD non formal dengan guru PAUD formal di gedung DPR MPR RI.

"Faktor utama dari ketidaksetaraan guru PAUD non formal dengan guru PAUD formal adalah tidak diakomodirnya

guru PAUD non formal di beberapa pasal dan ayat Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) yaitu Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 dan Undang-undang Guru dan Dosen, UU nomor 14 tahun 2005," kata Aida.

Dimana guru PAUD formal bisa mendapatkan sertifikasi, bisa mengikuti PPPK dan fasilitas lainnya sebagai guru namun tidak dengan guru PAUD non formal.

Sementara, Fernandez, pengurus Himpauadi Riau yang lain menambahkan bahwa beban yang diterima guru PAUD non formal sama dengan guru PAUD formal.

Lanjut Fernandez, dimana guru PAUD non formal dan guru PAUD formal sama sama mengajar anak usia dini. mereka mengajar sama sama mengacu pada kurikulum yang sama. Kemudian lembaga mereka juga sama sama di akreditasi dengan 8 standard pendidikan. Mereka juga sama sama dituntut untuk meningkatkan kompetensi dan

Silaturahmi dengan Baleg DPR RI, Himpaudi Riau Perjuangkan Kesetaraan Guru PAUD

« SEBELUMNYA

kualifikasi. apakah melalui PPG saat ini namanya, lalu ketika lulus PPG mereka mendapatkan dana sertifikasi. Sementara guru PAUD non formal tidak bisa mengikuti PPG dan mendapatkan sertifikasi. Guru PAUD non formal juga tidak bisa ikut PPPK dan lainnya yang bisa diikuti

oleh guru PAUD formal. Hal senada juga diungkapkan Lisia Karmila, yang juga ketua himpaudi kota Pekanbaru,” pungkasnya.

Hendry Munief, anggota Baleg DPR /MPR RI menyambut baik kedatangan rombongan Himpaudi Riau dengan tujuan untuk memperjuangkan kesetaraan guru PAUD non formal.

Dijelaskan Hendry Munief, walaupun ia seorang anggota komisi VII DPR/MPR RI, namun ia adalah seorang anggota Ba-

le, yang bisa membantu menyampaikan pesan perjuangan kesetaraan guru PAUD non formal ke komisi X DPR MPR RI yang membidangi Pendidikan.

Karena untuk merevisi sebuah Undang-undang, biasanya tetap melalui Baleg kemudian Komisi yang bersangkutan membuat Panitia Kerja atau Panja, misalnya komisi X membentuk Panja Revisi UU Sisdiknas.

Setelah dibentuk Panja akan ada rapat pleno, setelah rapat pleno akan kembali ke Baleg lagi. Begitu siklus sebuah revisi Undang-undang.

Hendry Munief mengapresiasi perjuangan yang dilakukan oleh Himpaudi. Agar guru PAUD non formal diakomodir statusnya sebagai guru dalam UU Sisdiknas. Sehingga guru PAUD non formal saat ini juga akan mendapatkan hak yang sama seperti guru PAUD formal, apakah itu sertifikasi, PPPK dan lainnya.

Untuk itu Hendry Munief meminta himpaudi Riau secara tertulis membuat surat yang berisi aspirasi tadi kepada Baleg dan komisi X DPR MPR RI.

Karena menurut Hendry Munief, untuk usulan ataupun revisi UU itu bisa berasal dari pemerintah, dari masyarakat ataupun dari anggota DPR itu sendiri. Dengan memiliki surat aspirasi tertulis yang dilengkapi dengan data, maka komisi x bisa menyampaikan usulan revisi UU.

le, yang bisa membantu menyampaikan pesan perjuangan kesetaraan guru PAUD non formal ke komisi X DPR MPR RI yang membidangi Pendidikan.

Karena untuk merevisi sebuah Undang-undang, biasanya tetap melalui Baleg kemudian Komisi yang bersangkutan membuat Panitia Kerja atau Panja, misalnya komisi X membentuk Panja Revisi UU Sisdiknas.

Setelah dibentuk Panja akan ada rapat pleno, setelah rapat pleno akan kembali ke Baleg lagi. Begitu siklus sebuah revisi Undang-undang.

Hendry Munief mengapresiasi perjuangan yang dilakukan oleh Himpaudi. Agar guru PAUD non formal diakomodir statusnya sebagai guru dalam UU Sisdiknas. Sehingga guru PAUD non formal saat ini juga akan mendapatkan hak yang sama seperti guru PAUD formal, apakah itu sertifikasi, PPPK dan lainnya.

Untuk itu Hendry Munief meminta himpaudi Riau secara tertulis membuat surat yang berisi aspirasi tadi kepada Baleg dan komisi X DPR MPR RI.

Karena menurut Hendry Munief, untuk usulan ataupun revisi UU itu bisa berasal dari pemerintah, dari masyarakat ataupun dari anggota DPR itu sendiri. Dengan memiliki surat aspirasi tertulis yang dilengkapi dengan data, maka komisi x bisa menyampaikan usulan revisi UU.

le, yang bisa membantu menyampaikan pesan perjuangan kesetaraan guru PAUD non formal ke komisi X DPR MPR RI yang membidangi Pendidikan.

Karena untuk merevisi sebuah Undang-undang, biasanya tetap melalui Baleg kemudian Komisi yang bersangkutan membuat Panitia Kerja atau Panja, misalnya komisi X membentuk Panja Revisi UU Sisdiknas.

Setelah dibentuk Panja akan ada rapat pleno, setelah rapat pleno akan kembali ke Baleg lagi. Begitu siklus sebuah revisi Undang-undang.

Hendry Munief mengapresiasi perjuangan yang dilakukan oleh Himpaudi. Agar guru PAUD non formal diakomodir statusnya sebagai guru dalam UU Sisdiknas. Sehingga guru PAUD non formal saat ini juga akan mendapatkan hak yang sama seperti guru PAUD formal, apakah itu sertifikasi, PPPK dan lainnya.

Untuk itu Hendry Munief meminta himpaudi Riau secara tertulis membuat surat yang berisi aspirasi tadi kepada Baleg dan komisi X DPR MPR RI.

Karena menurut Hendry Munief, untuk usulan ataupun revisi UU itu bisa berasal dari pemerintah, dari masyarakat ataupun dari anggota DPR itu sendiri. Dengan memiliki surat aspirasi tertulis yang dilengkapi dengan data, maka komisi x bisa menyampaikan usulan revisi UU.



Image istimewa



“Faktor utama dari ketidaksetaraan guru PAUD non formal dengan guru PAUD formal adalah tidak diakomodirnya guru PAUD non formal di beberapa pasal dan ayat Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) yaitu Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 dan Undang-undang Guru dan Dosen, UU nomor 14 tahun 2005,”

H. HENDRY MUNIEF, M.B.A.

Anggota Badan Legislasi DPR RI

Sosialisasi Program MBG di Dapil, Alifudin Dorong Gizi Berkualitas untuk Generasi Sehat Indonesia

Kubu Raya (17/03) — Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS dari Dapil Kalimantan Barat I, Alifudin mengadakan sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis di Kubu Raya bersama Badan Gizi Nasional.

Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dengan menyediakan makanan bergizi yang terjangkau dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Kegiatan ini dihadiri oleh warga setempat serta sejumlah perwakilan dari berbagai organisasi masyarakat.

Dalam sambutannya, Alifudin menyampaikan pentingnya asupan gizi yang seimbang dalam kehidupan sehari-hari.

"Masyarakat harus memastikan bahwa setiap makanan

yang dikonsumsi tidak hanya mengenyangkan, tetapi juga memenuhi kebutuhan gizi yang baik. Gizi yang seimbang sangat penting untuk mendukung tumbuh kembang anak, meningkatkan daya tahan tubuh, dan menjaga kesehatan secara keseluruhan," ujar Alifudin.

Alifudin juga menekankan pentingnya kesadaran masyarakat akan kualitas makanan yang dikonsumsi.

"Saya mengajak seluruh masyarakat untuk selalu memilih makanan yang bergizi, sehat, dan aman. Selain itu, kita juga harus peduli terhadap

keberlanjutan program makan bergizi gratis yang sedang digalakkan oleh pemerintah. Program ini tidak hanya bermanfaat bagi mereka yang kurang mampu, tetapi juga dapat meningkatkan kualitas hidup kita semua," tambahnya.

Sebagai anggota Komisi IX DPR RI, Alifudin berkomitmen untuk terus mengawasi jalannya program makan bergizi gratis ini agar berjalan dengan lancar dan merata ke seluruh masyarakat yang menjadi sasaran program.

"Sebagai bagian dari tugas saya di Komisi IX, saya akan terus memantau pelaksanaan program ini agar dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran. Kami juga akan memastikan bahwa anggaran untuk program ini digunakan secara transparan dan efektif, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya dengan optimal," tegasnya.

Alifudin juga mengajak seluruh masyarakat untuk aktif mendukung program makan bergizi gratis dengan cara memanfaatkan fasilitas yang ada.

"Saya berharap masyarakat di Kubu Raya dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan baik, terutama bagi keluarga yang membutuhkan. Program ini adalah langkah nyata dalam mendukung kehidupan sehat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," jelasnya.

Alifudin turut mengingat-



"Mari kita bersama-sama mendukung program ini dengan memastikan kita mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Kesehatan adalah aset berharga yang perlu kita jaga dengan baik.

H. ALIFUDIN, S.E., M.M.
Anggota Komisi IX DPR RI

kan pentingnya peran serta masyarakat dalam menjaga kesehatan bersama dan dukungan terhadap program makan bergizi gratis.

"Mari kita bersama-sama mendukung program ini dengan memastikan kita mengonsumsi

makanan yang sehat dan bergizi. Kesehatan adalah aset berharga yang perlu kita jaga dengan baik. Dengan dukungan semua pihak, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan produktif," tutupnya.



Hadiri Khatam Qur'an, Buka Puasa,
dan Tabligh Akbar,

Saadiah Ajak Perbanyak Interaksi dengan Al-Quran

Ambon (18/03) -- Dalam rangka menyambut keberkahan bulan suci Ramadhan 1446 H, Majelis Ta'lim Fakultas Teknik Universitas Pattimura (Unpatti) menggelar kegiatan Khatam Al-Qur'an, Buka Puasa, dan Tabligh Akbar di Masjid Darul Hasanah, Poka, Kota Ambon. Acara ini menghadirkan Anggota DPR Dapil Maluku, Saadiah Uluputty.

Dengan mengusung tema 'Menguatkan Ukhuwah Islamiyah dengan Toleransi dan Kebersamaan dalam Menjemput Berkah di Bulan Ramadhan' giat ini dihadiri oleh sekitar 30 peserta.

Saadiah Uluputty sebagai wakil rakyat dari Indonesia Timur juga dikenal sebagai tokoh yang aktif dalam membangun kesadaran keislaman dan kebersamaan di tengah masyarakat. Dalam tausiyahnya, beliau menekankan pentingnya menjadi-

kan Al-Qur'an sebagai sahabat sejati dalam kehidupan.

"Di bulan suci ini, kita harus mengasah fitrah dan iman agar semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Qur'an bukan hanya untuk dibaca, tetapi juga dipahami dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari," ujar Saadiah Uluputty.

Acara ini juga menjadi ajang reuni bagi politisi perempuan PKS ini, dimana beliau merupakan salah satu

generasi awal Majelis Ta'lim Fakultas Teknik Unpatti sejak tahun 1992.

Keterlibatannya dalam kegiatan ini membawa nuansa nostalgia sekaligus memperkuatkan silaturahmi antar generasi.

Dalam kesempatan tersebut, peserta diajak untuk menjadikan Ramadhan sebagai momentum memperbanyak ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah.

Khatam Al-Qur'an menjadi target utama, mengingat bahwa kitab suci ini akan menjadi cahaya bagi setiap Muslim di kehidupan setelah dunia.

"Masa muda adalah waktu terbaik untuk menabung bekal akhirat. Kita harus memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya untuk beribadah, menebarkan kebaikan, dan memperkuat ukhuwah Islamiyah," tambah Saadiah yang kini duduk di Komisi IV DPR.

Setelah khatam Al-Qur'an dan tausiyah, acara dilanjutkan dengan buka puasa bersama, mempererat kebersamaan dalam suasana penuh kekhidmatan.

"Terseleenggaranya kegiatan ini, saya berharap muncul semangat kebersamaan dan kepedulian terhadap sesama semakin tumbuh di kalangan masyarakat, khususnya generasi muda Muslim di Kota Ambon," tutup Saadiah Uluputty.



"Di bulan suci ini, kita harus mengasah fitrah dan iman agar semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Qur'an bukan hanya untuk dibaca, tetapi juga dipahami dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari,"

SAADIAH ULUPUTTY, S.T

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Maluku



image istimewa

Sosialisasi di Makassar, Meity Rahmatia Tunjukkan Nilai Budaya sebagai Penguat Empat Pilar Kebangsaan

Makassar (20/03) --- Anggota DPR RI sekaligus MPR RI dari Fraksi PKS, Meity Rahmatia kembali menggelar sosialisasi empat pilar di Kota Makassar, Selasa (18/03/2025).

Dalam kegiatan tersebut, politisi yang akrab disapa Hajah Meity itu tampil memukau dengan sarung sutra khas Sulawesi Selatan.

Ia sengaja mengenakan busana tersebut untuk menunjukkan kepada khalayak, nilai budaya adalah salah satu pondasi yang mengkokohkan bangunan empat pilar di Indonesia.

"Hari ini saya sengaja memakai pakaian dari bahan sarung sutra khas Sulawesi sebagai bentuk perhatian terhadap budaya lokal dan implementasi dari nilai Pancasila," jelasnya.

Meity berkeyakinan, empat pilar yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, semboyan Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadikan nilai-nilai budaya masyarakat di nusantara yang beragam sebagai sumber inspirasi.

Sebab itu, menurutnya, realitas tersebut benar-benar patut disyukuri oleh seluruh anak bangsa Indonesia.

"Bagi saya, tak ada negeri di dunia ini yang sekaya kita dari segi kebudayaan, etnik, bahasa dan agama. Kita

berbeda, tapi satu dalam rasa nasionalisme sebagai bangsa Indonesia. Itu satu kebanggaan yang tak dimiliki oleh bangsa lain," ungkapnya.

Meity yang dikenal pula sebagai aktivis sosial itu menuptu ulasanya dengan harapan, masyarakat Kota Makassar selalu cinta tanah air, dan berkontribusi nyata dalam pembangunan bangsa dan negara tanpa melupakan nilai-nilai budaya dan kearifan lokalnya.

"Identitas kita sebagai bangsa Indonesia, terletak pada keragaman etnik dan budaya ini. Jadi, nilai-nilainya kita jaga bersama," pintanya.

Kegiatan sosialisasi empat pilar ini berlangsung selama beberapa jam lamanya.

Selain Meity, tampil sebagai pembicara guru besar Universitas Negeri Islam Alauddin, Nurhidayat M. Said. Dalam materinya, dosen yang bergelar master dan doktor bidang agama itu mengatakan, Pancasila sebagai dasar negara telah mewakili keberagaman bangsa Indonesia.

"Penduduk negara yang

Sosialisasi di Makassar, Meity Rahmatia Tunjukkan Nilai Budaya sebagai Penguat Empat Pilar Kebangsaan

« SEBELUMNYA

kita cintai ini misalnya mayoritas penganut agama, terutama 80 sekian persen lebih beragama Islam. Terwakili dalam sila pertama, bahwa Indonesia adalah negara berketuhanan yang Maha Esa," terangnya.

la melanjutkan, bahasanya bahwa Indonesia adalah negara

yang terdiri dari pulau-pulau dengan latar etnik, bahasa, budaya dan potensi ekonomi yang berbeda-beda. Kenyataan itu diwakili oleh sila persatuan Indonesia.

"Hal itu dikuatkan lagi dengan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang menuntut adanya pemerataan pembangunan dari pusat ke

daerah," jelasnya.

Indonesia bisa dikatakan sebagai negara yang hampir paripurna dari aspek ketatanegaraan menurut dosen yang akrab disapa Prof Hidayat tersebut.

"Dari aspek sistem ketatanegaraan, negara Indonesia sudah sangat ideal, dan telah mewakili keberagaman dan kebutuhan warga negaranya. Sekarang yang dipertanyakan sebenarnya, adalah integritas penyelenggara negara dan warga negara untuk menjaga agar negara ini maju dan berkembang di masa depan," pungkasnya.



image istimewa



“Dari aspek sistem ketatanegaraan, negara Indonesia sudah sangat ideal, dan telah mewakili keberagaman dan kebutuhan warga negaranya. Sekarang yang dipertanyakan sebenarnya, adalah integritas penyelenggara negara dan warga negara untuk menjaga agar negara ini maju dan berkembang di masa depan,

**Hj. MEITY RAHMATIA,
S.Pd., S.E., M.M.**

Anggota Komisi XIII DPR RI



Dukung Khatam Qur'an di Dapil Sumbar II, Nevi Dorong Semangat Keagamaan di Bulan Ramadhan

Kab. Agam (19/03) --- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Nevi Zuairina, menghadiri acara khatam Al-Qur'an yang diselenggarakan oleh jamaah Masjid Jami' Koto Marapak, Jorong Lambah, Nagari Panampuang, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam.

Acara yang berlangsung khidmat ini menjadi salah satu rangkaian kegiatan Ramadhan yang bertujuan untuk meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap Al-Qur'an serta mempererat ukhuwah Islamiyah di tengah-tengah umat.

Dalam kesempatan tersebut, Nevi menyampaikan apresiasi dan dukungannya terhadap kegiatan khatam Qur'an yang rutin dilakukan di berbagai daerah di Sumatera Barat, khususnya di Dapil Sumbar II.

Menurutnya, acara ini tidak hanya menjadi ajang untuk

merayakan pencapaian dalam membaca dan memahami Al-Qur'an, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun generasi yang mencintai nilai-nilai Islam sejak dini.

"Khatam Al-Qur'an bukan sekadar seremonial, tetapi juga momentum untuk meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Saya sangat mengapresiasi semangat masyarakat, khususnya anak-anak dan generasi muda yang aktif dalam kegiatan keagamaan seperti ini," ujar Nevi.

Selain menghadiri khatam Qur'an, Politisi PKS ini juga mendukung berbagai kegiatan positif lainnya yang diselenggarakan selama bulan Ramadhan, seperti Lomba Adzan dan Doa Setelah Adzan, Lomba Cerdas Cermat, Lomba Tahfidz, serta Lomba Tilawah.

Menurutnya, perlombaan ini bukan hanya sekadar kompetisi, tetapi juga menjadi sarana untuk mengasah keterampilan keagamaan sekaligus meningkatkan kepercayaan diri anak-anak dalam menyampaikan bacaan Al-Qur'an dan doa-doa harian.

Wakil Rakyat Sumbar itu berharap kegiatan semacam ini terus digalakkan setiap tahun dengan dukungan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, tokoh agama, dan masyarakat.

Ia juga menegaskan komitmennya dalam memperjuangkan program-program yang berkaitan dengan pendidikan agama serta penguatan moral generasi muda melalui berbagai kebijakan di tingkat nasional.

"Mari kita jadikan Ramadhan sebagai bulan pembinaan bagi diri kita dan anak-anak kita. InsyaAllah, generasi Qur'ani yang kita bina hari ini akan menjadi pemimpin masa depan yang berakhlak mulia, cerdas, dan berkontribusi bagi bangsa dan agama," tutup Nevi Zuairina.



"Khatam Al-Qur'an bukan sekadar seremonial, tetapi juga momentum untuk meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Saya sangat mengapresiasi semangat masyarakat, khususnya anak-anak dan generasi muda yang aktif dalam kegiatan keagamaan seperti ini,"

Hj. NEVI ZUAIRINA

Anggota Fraksi PKS DPR RI
Dapil Sumatera Barat II



Guna Tekan Angka Tunggakan, Dewan RI Achmad Ru'yat Ajak BPJS Kesehatan Sosialisasikan Program JKN

Cibinong (20/03) — Kepala Bidang Kepesertaan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan Cabang Cibinong, Betty Parapat menyebutkan bahwa hingga hari ini jumlah peserta BPJS yang menunggak di Kabupaten Bogor mencapai 1 juta peserta.

Hal ini tentu menggerakkan anggota Komisi IX DPR RI daerah pemilihan (dapil) Kabupaten Bogor, Achmad Ru'yat menggandeng BPJS Kesehatan sebagai mitra kerjanya untuk menggelar sosialisasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor.

Dihadiri oleh 300 orang peserta, Betty mengatakan bahwa hingga saat ini tidak ada pemutihan terhadap tunggakan peserta BPJS.

"Ada kebijakan dari pemerintah, tunggakan 5 tahun bisa di hapuskan 2 tahun tunggakkannya, untuk lebih meringankan beban masyarat, BPJS juga punya program cicilan bernama rehap di JKN Mobile," ujar Betty.

Menyikapi fakta ini, Achmad Ru'yat juga menambahkan, Disinilah pentingnya sosialisasi dari BPJS Kesehatan.

"Alhamdulillah Pak Ichwansyah Gani selaku Kepala Cabang BPJS Kesehatan Kabupaten Bogor dan juga Bu Betty dari BPJS Kabupaten Bogor hadir untuk memberikan penerangan kesadaran

pentingnya melakukan langkah preventif untuk disiplin, katakanlah kewajiban karena terus terang bahwa kartu BPJS ini sebagai suatu langkah preventif untuk jaga-jaga kalau sakit dan sebagainya, mudah-mudahan dengan sosialisasi ini tunggakan tersebut akan mengalami pengurangan," kata Ru'yat, Rabu (19/03/2025).

"Alhamdulillah Pak Ichwansyah Gani selaku Kepala Cabang BPJS Kesehatan Kabupaten Bogor dan juga Bu Betty dari BPJS Kabupaten Bogor hadir untuk memberikan penerangan kesadaran pentingnya melakukan langkah preventif untuk disiplin, katakanlah kewajiban karena terus terang bahwa kartu BPJS ini sebagai suatu langkah preventif untuk jaga-jaga kalau sakit dan sebagainya, mudah-mudahan dengan sosialisasi ini tunggakan tersebut akan mengalami pengurangan,"

drh. H. ACHMAD RU'YAT, M.Si.

Anggota Komisi IX DPR RI

Mantan Wakil Wali Kota Bogor ini juga menambahkan, giat ini juga salah satu langkah yang dilakukan Komisi IX DPR RI dalam melakukan interaksi dan berdialog dengan masyarakat.

"Hasilnya, masyarakat juga banyak mendapatkan informasi-informasi baru sehingga apa yang menjadi target Bapak Presiden Prabowo Subianto, kami grassroot itu bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, bahwa Inpres (Instruksi Presiden) nomor satu tahun 2025 terkait dengan efisiensi itu jangan sampai terjadi pada aspek kesehatan dan pendidikan terutama," pungkas Ru'yat.



Catat Yuk! Jadual Libur Sekolah di Ramadan 2025

Pemerintah Terbitkan Surat Edaran Bersama
untuk Pembelajaran Semasa Ramadan



PKS TV DPR RI | FPKS DPR RI | @fraksipkdprri | @fraksipkdprri | @fraksipkdprri



Momen ramadan bisa menjadi kesempatan emas untuk **meningkatkan prestasi belajar** melalui kegiatan yang terarah di sekolah. Lomba keagamaan, diskusi nilai-nilai Ramadan, atau kajian keislaman dapat menjadi bagian dari kurikulum yang memperkuat iman sekaligus menjaga semangat belajar.

Habib Idrus Salim Aljufri, Lc., M.B.A
Anggota DPR RI



PKS TV DPR RI | FPKS DPR RI | @fraksipkdprri | @fraksipkdprri | @fraksipkdprri

DPR RI | Grafis: Heri



Tanggal Libur
27 Februari
s/d
5 Maret
Kegiatan belajar mandiri
dilingkungan keluarga, tempat ibadah,
atau masyarakat

26 Maret
s/d
8 April
Libur Idulfitri

*Aturan diteken
Mendikdasmen, Menag,
dan Mendagri



PKS TV DPR RI | FPKS DPR RI | @fraksipkdprri | @fraksipkdprri | @fraksipkdprri

Sumber: itjen.kemdikbud.go.id | Grafis: Heri



image istimewa

Terima Kunjungan IKARUS, Fraksi PKS Dorong Perkuat Silaturahmi dan Kebersamaan

Jakarta (14/03) --- Tenaga Ahli Fraksi PKS DPR RI menerima kunjungan dari Ikatan Alumni Raudhatul Ulum Sakatiga (IKARUS)

di Ruang Rapat Pleno Fraksi PKS, Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Jumat (14/03). Kunjungan ini menjadi

“Kami menerima kunjungan ini dengan pintu terbuka dan penuh rasa syukur. Silaturahmi seperti ini sangat penting untuk mempererat kebersamaan, dan kami berharap ikatan alumni ini dapat terus menjadi wadah persaudaraan yang kuat,”

**DR. H. ANDI
AMRULLAH, Lc., M.E.I**

Tenaga Ahli Fraksi PKS DPR RI

ajang silaturahmi antara Fraksi PKS dengan para alumni Raudhatul Ulum Sakatiga.

Ketua rombongan IKARUS, Arinal, menyampaikan rasa terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk bertemu langsung dengan perwakilan Fraksi PKS di DPR RI.

“Kami sangat berterima kasih dan merasa senang bisa bersilaturahmi ke Fraksi PKS DPR RI. Semoga hubungan baik ini bisa terus berjalan dan membawa manfaat bagi kita semua,” ujar Arinal dalam sambutannya.

Sementara itu, Tim Tenaga Ahli menyambut baik kunjungan tersebut dan berharap pertemuan ini menjadi awal dari kerja sama yang lebih erat ke

depannya.

“Kami menerima kunjungan ini dengan pintu terbuka dan penuh rasa syukur. Silaturahmi seperti ini sangat penting untuk mempererat kebersamaan, dan kami berharap ikatan alumni ini dapat terus menjadi wadah persaudaraan yang kuat,” ungkap Andi, Tenaga Ahli Fraksi PKS DPR RI.

Setelah sesi perkenalan dan penyampaian sambutan, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi yang membahas berbagai topik terkait peran alumni dalam membangun kontribusi bagi masyarakat. Acara kemudian ditutup dengan kebersamaan dalam momen berbuka puasa.



image istimewa

Fraksi PKS Terima Audiensi HIMPAUDI, Bahas Peran dan Kesejahteraan Pendidik PAUD Non Formal

Jakarta (20/03) --- Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah menerima audiensi dari Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI) di Ruang Rapat Pleno Fraksi PKS, Gd. Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu (19/03/2025).

Dalam pertemuan tersebut, HIMPAUDI menyampaikan aspirasi terkait peran serta kesejahteraan pendidik PAUD non formal yang hingga kini masih belum mendapat pengakuan dalam regulasi pendidikan nasional.

Ketua HIMPAUDI, Dr. Betti Nuraini, M.M., dalam sambutannya mengungkapkan bahwa HIMPAUDI menaungi sekitar 400 ribu pendidik PAUD di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, sekitar 72% tenaga pendidik PAUD non formal menerima gaji di bawah Rp250.000 per bulan, kondisi yang jauh dari kata sejahtera.

"Kami berharap pemerintah lebih memperhatikan nasib para pendidik PAUD non formal yang hingga saat ini belum diakui sebagai guru dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Akibatnya, mereka tidak mendapatkan hak-hak yang seharusnya, baik dalam hal kesejahteraan, penghargaan profesi, maupun perlindungan

hukum," ujar Dr. Betti.

Lebih lanjut, HIMPAUDI mengusulkan revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) agar terintegrasi dengan UU Guru dan Dosen, sehingga hak-hak profesi guru PAUD non formal dapat diakomodasi.

Menanggapi aspirasi tersebut, Ledia menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap perjuangan para pendidik PAUD non formal.

"Selamat datang para pejuang dari HIMPAUDI, semoga Allah memberkahi perjuangan ini. Isu kesejahteraan tenaga pendidik memang menjadi perhatian kita bersama. Mereka harus mendapatkan hak-haknya untuk hidup layak," ungkap Ledia.

Ia menegaskan bahwa perlu ada langkah sistematis dan terstruktur dalam menata regulasi pendidikan, khususnya dalam pembahasan RUU Sisdiknas yang akan

Fraksi PKS Terima Audiensi HIMPAUDI, Bahas Peran dan Kesejahteraan Pendidik PAUD Non Formal

◀ SEBELUMNYA

berlangsung tahun ini.

"Kita berharap Menteri Pendidikan memiliki semangat dan tanggung jawab moral yang kuat untuk memajukan pendidikan nasional," tegasnya.

Menurut Ledia, HIMPAUDI dengan jumlah pendidik sebanyak 400 ribu, atau sekitar 230 ribu yang sudah terdaftar di Dapodik, merupakan modal sosial yang besar bagi

kemajuan pendidikan nasional.

Dalam sesi diskusi, perwakilan HIMPAUDI dari berbagai daerah seperti Bandung, Tasikmalaya, dan Cirebon juga menyampaikan tuntutan agar ada kesetaraan hak antara guru PAUD non formal dan formal. Mereka menyoroti bahwa meskipun beban kerja dan standar akreditasi yang diterapkan sama, pendidik PAUD non formal masih belum mendapatkan fasilitas yang setara.

Sebagai respons, Fraksi PKS mendorong agar HIMPAUDI terus membangun komunikasi dengan para pemangku kebijakan di daerah masing-masing.

"Mumpung kepala daerah baru saja dilantik, kami menghimbau agar seluruh pengurus daerah HIMPAUDI melakukan silaturahmi ke kepala daerah dan Komisi IV di DPRD setempat. Semoga ada respons positif dari pemerintah daerah untuk mendukung perjuangan ini," ungkap Ledia.

Sebagai penutup, Ledia meyakinkan bahwa Fraksi PKS Insya Allah terus berkomitmen memperjuangkan aspirasi rekan-rekan HIMPAUDI dalam tahapan pembahasan RUU Sisdiknas.



image istimewa



"Selamat datang para pejuang dari HIMPAUDI, semoga Allah memberkahi perjuangan ini. Isu kesejahteraan tenaga pendidik memang menjadi perhatian kita bersama. Mereka harus mendapatkan hak-haknya untuk hidup layak,"

**Hj. LEDIA HANIFA A,
S.Si., M.Psi.T**
Anggota Komisi X DPR RI



image istimewa

Terima Aspirasi Joko Energi Indonesia Terkait Proyek Fuelsaver, Fraksi PKS Akan Tindak Lanjuti

Jakarta (21/03) — Fraksi PKS DPR RI menerima aspirasi dari perwakilan Joko Energi Indonesia, Faisal Nirwan, dalam sebuah pertemuan daring pada Kamis (20/03/2025), yang diterima oleh Tenaga Ahli Kelompok Komisi V dan XII.

menyampaikan kendala yang dihadapi terkait proyek pemasangan alat fuelsaver di Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Bontang, Kalimantan, yang telah dikerjasamakan dengan PLN. “Kami mengapresiasi kehadiran Pak Faisal Nirwan

“Kami akan berkoordinasi dengan anggota Fraksi PKS, terutama yang berada di Komisi VI dan XII yang membidangi BUMN dan energi, agar komunikasi dengan PLN bisa kembali dibuka,”

TEANGA AHLI FRAKSI PKS DPR RI

yang telah menyampaikan aspirasinya kepada Fraksi PKS. Kami memahami bahwa proyek ini memiliki potensi besar dalam meningkatkan efisiensi bahan bakar di PLTD Bontang, sebagaimana hasil uji coba yang menunjukkan efisiensi hingga 14 persen,” ujar perwakilan Tenaga Ahli Fraksi PKS DPR RI.

Namun, Faisal mengungkapkan bahwa meskipun hasil uji coba menunjukkan keberhasilan, pihak PLN Bontang belum merekomendasikan penggunaan alat tersebut.

“Pada percobaan pertama, memang ada air yang keluar di saluran intake mesin, tetapi setelah dilakukan perbaikan, lima kali percobaan berikutnya tidak ada lagi air yang keluar. Namun, PLN tetap tidak memberikan rekomendasi lebih lanjut,” jelasnya.

Lebih lanjut, Faisal menyampaikan bahwa pihaknya telah mengeluarkan biaya sebesar Rp2,6 miliar untuk proyek ini,

tetapi hingga saat ini PLN belum mengganti biaya tersebut.

“Kami merasa kurangnya apresiasi terhadap inovasi anak bangsa dan berharap Fraksi PKS dapat membantu menjembatani komunikasi kami dengan PLN agar ada titik temu terkait penggantian biaya yang telah dikeluarkan,” ungkapnya.

Menanggapi hal ini, perwakilan Tenaga Ahli Fraksi PKS menegaskan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan.

“Kami akan berkoordinasi dengan anggota Fraksi PKS, terutama yang berada di Komisi VI dan XII yang membidangi BUMN dan energi, agar komunikasi dengan PLN bisa kembali dibuka,” jelasnya.

Fraksi PKS DPR RI berkomitmen untuk terus mendukung inovasi anak bangsa dan memastikan adanya kejelasan dalam setiap kerja sama dengan BUMN, terutama yang berkaitan dengan efisiensi energi dan pengelolaan anggaran negara.



image istimewa

HNW: Kejahatan Israel pada Gaza Lebih dari Holocaust Nazi pada Yahudi, Dunia Harus Hentikan!

Jakarta (20/03) — Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) dari Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid, mengutuk serangan kembali brutal Israel ke Gaza, Palestina, setelah sebelumnya melarang dikirimnya bantuan kemanusiaan, menyetop aliran listrik, air, obat-obatan, disaat gencatan senjata dilakuk-

"Peristiwa holocaust Nazi terhadap orang Yahudi yang itu hanya terjadi beberapa tahun dalam perang dunia kedua, yakni dari 1941-1945. Sedangkan, penjajahan dan genosida Israel terhadap bangsa Palestina sudah berlangsung puluhan tahun, bahkan sejak peristiwa Nakba pada 1948 hingga salah satu puncaknya pada saat ini,"

ujarnya melalui siaran pers di Jakarta, Kamis(20/03).

HNW sapaan akrabnya mengatakan dalam rangka menyelamatkan kemanusiaan dan peradaban maka negara-negara di dunia, termasuk Perserikatan Bangsa - Bangsa (PBB), mestinya mengambil tindakan yang lebih konkret untuk menghentikan kejahatan Israel terhadap bangsa Palestina ini. Kasus yang semakin memirisakan adalah serangan brutal Israel ke segala penjuru Gaza setelah para warga sipil kembali ke tanahnya pasca disepakatinya gencatan senjata.

"Sampai hari ini, dalam tiga hari serangan brutal Israel, sudah lebih dari 510 korban syuhada dan ribuan lainnya terluka, korban sebagian besar adalah warga sipil perempuan, anak-anak dan orang tua. Ini menambah korban syuhada di Palestina sejak 7 Oktober 2023 yang sudah lebih dari 47.500 orang meninggal," ungkapnya.

Kejahatan kemanusiaan yang dilakukan Israel terhadap bangsa Palestina bukan hanya melanggar hukum internasional, tetapi juga pengulangan terhadap tindakan Nazi yang dipimpin oleh Adolf Hitler dalam peristiwa holocaust.

"Israel untuk kesekian kalinya secara terbuka melakukan apa yang dulu dilakukan oleh Nazi terhadap Yahudi, padahal berbeda dengan Yahudi, orang-orang Palestina justru adalah warga yang dahulu dengan

amat sangat baik menerima kehadiran imigran Yahudi yang menjadi korban Holocaust Nazi. Tapi ibarat air susu dibalas dengan air tuba, Israel bukannya membalas kebaikan warga Palestina dengan menghadirkan perdamaian dan menaati kesepakatan gencatan senjata, tetapi justru melakukan kejahatan kemanusiaan terhadap warga Palestina dengan sangat brutal dan bahkan melebihi apa yang dilakukan oleh Nazi terhadap bangsa Yahudi," tambahnya.

HNW juga secara khusus mengkritik negara-negara barat yang kerap membuat peringatan terhadap peristiwa Holocaust, dan bahkan di beberapa negara dibangun museum untuk memperingatinya.

"Bagaimana mungkin, peristiwa Holocaust Nazi di masa lalu itu diperingati, tetapi perilaku Israel yang mempraktikkan hal yang sama di masa kini justru dibiarkan dan tidak dihentikan?" tukasnya.

Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengatakan, kejahatan Israel tidak cukup direspons dengan kutukan.

Menurutnya, sangat penting bagi lembaga-lembaga internasional yang kompeten untuk segera melaksanakan keputusannya. International Court of Justice (ICJ), International Criminal Court

HNW: Kejahatan Israel pada Gaza Lebih dari Holocaust Nazi pada Yahudi, Dunia Harus Hentikan !

« SEBELUMNYA

(ICC) dan PBB harus segera melakukan realisasi dari keputusannya menghukum Israel termasuk juga mengusahakan mengeluarkan Israel dari keanggotaan PBB karena berulangnya pelanggaran Israel terhadap Resolusi2 PBB. ICC juga penting menangkap Netanyahu agar kejahatannya dapat dihentikan, dan kemudian ICJ dan PBB memerintahkan agar tanah Palestina dibebaskan dari penjajahan Israel yang ilegal itu. Selain itu, HNW juga

berharap agar negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), khususnya negara Arab yang baru saja menyelenggarakan pertemuan Menteri Luar Negeri OKI di Jeddah dan pertemuan Tingkat Tinggi Kepala Negara Liga Arab di Kairo, agar betul-betul melaksanakan keputusannya untuk menolak keberlanjutan perang dan genosida di Palestina, mendukung gencatan senjata dan perjuangan Palestina hingga merdeka.

“Termasuk menolak pengusiran terhadap warga Gaza

dan akan melakukan pembangunan kembali (rekonstruksi) terhadap Gaza. Tetapi tidak mungkin melakukan rekonstruksi Gaza bila Israel dibiarkan terus melakukan kejahatannya dengan menyerang dan membunuh warga Gaza dengan serangan yang luar biasa diadab dan melanggar secara hukum internasional itu,” tegas HNW.

HNW menambahkan, sedangkan bagi Indonesia, sudah saatnya makin melaksanakan Konstitusi, selain mengeluarkan sikap yang mengutuk keras, tapi juga semakin aktif terdepan membela gencatan senjata/perdamaian yang dipegang teguh pejuang Hamas di Palestina yang dikhianati kembali oleh Israel.

la menuturkan kejahatan2 Israel itu sudah ditolak oleh warga dunia, para mahasiswa dan warga di Eropa, Amerika, Australia, Jepang dan di banyak belahan dunia lainnya.

“Mereka melakukan demonstrasi besar-besaran menolak berlangsungnya kembali genosida, menolak berlangsungnya kembali pengkhianatan perdamaian hingga berlanjutnya kejahatan kemanusiaan di Gaza. Jadi Indonesia tidak sendirian, inilah momentum untuk menyelamatkan kemanusiaan dan peradaban dunia melalui penyelamatan Gaza dan menghentikan kejahatan kemanusiaan yang secara brutal kembali dilakukan



image istinewa

“Sampai hari ini, dalam tiga hari serangan brutal Israel, sudah lebih dari 510 korban syuhada dan ribuan lainnya terluka, korban sebagian besar adalah warga sipil perempuan, anak-anak dan orang tua. Ini menambah korban syuhada di Palestina sejak 7 Oktober 2023 yang sudah lebih dari 47.500 orang meninggal,”

**Dr. H.M. HIDAYAT
NUR WAHID, M.A**

Anggota Komisi VIII DPR RI



image istimewa

Aleg PKS Riyono Caping : Kembali ke Pangan Lokal, Wujud Kemandirian dan Ketahanan Pangan Bangsa

Jakarta (21/03) -- Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Riyono Caping, mengajak masyarakat untuk kembali ke pangan lokal sebagai langkah strategis dalam mewujudkan kemandirian dan ketahanan pangan nasional.

Ajakan ini disampaikan dalam kegiatan berbagi 1.000 paket sayuran dan 300 paket ikan asin kepada para pengguna jalan di sekitar kantor DPTP PKS, Jakarta Selatan, Rabu (19/3/2025).

Acara ini turut dihadiri oleh Presiden PKS Ahmad Syaikh, yang juga ikut serta dalam pembagian bahan pangan segar tersebut.

Menurut Ketua DPP PKS Bidang Tani dan Nelayan ini, ketergantungan pada impor pangan harus dikurangi demi melindungi kesejahteraan petani dan nelayan dalam negeri serta memastikan ketersediaan pangan yang lebih berdaulat.

Ia menekankan bahwa pangan lokal tidak hanya lebih sehat dan segar, tetapi juga lebih berkelanjutan bagi perekonomian nasional.

"Kami ingin mengajak masyarakat untuk lebih mencintai dan mengutamakan produk petani dan nelayan lokal. Dengan mengonsumsi pangan yang dihasilkan di dalam negeri, kita bukan hanya membantu petani dan nelayan, tetapi juga memperkuat

ketahanan pangan bangsa di tengah tantangan global. Ini adalah langkah nyata untuk mewujudkan Indonesia yang lebih mandiri dalam sektor pangan," ujar Riyono.

Ia juga menyoroti bagaimana perubahan pola konsumsi masyarakat dapat membawa dampak besar bagi sektor pertanian dan perikanan. Dengan meningkatnya minat terhadap produk lokal, petani dan nelayan akan lebih termotivasi untuk meningkatkan produksi dan kualitas hasil panennya.

"Saat ini, banyak produk pertanian dan perikanan kita yang masih kalah bersaing dengan impor. Padahal, kualitas hasil tani dan tangkapan nelayan lokal tidak kalah baiknya. Jika masyarakat lebih memilih sayuran, ikan, dan hasil pertanian dari petani dan nelayan kita sendiri, maka dampaknya akan sangat besar terhadap kesejahteraan mereka," tambahnya.

Kegiatan berbagi 1.000 paket sayuran dan 300 paket ikan asin ini juga menjadi

Aleg PKS Riyono Capping : Kembali ke Pangan Lokal, Wujud Kemandirian dan Ketahanan Pangan Bangsa

« SEBELUMNYA

simbol komitmen PKS dalam memperjuangkan kepentingan petani dan nelayan. Riyono menegaskan bahwa PKS akan terus mendorong kebijakan yang mendukung sektor pertanian dan perikanan, termasuk perlindungan harga hasil panen, akses pupuk dan alat tangkap

yang lebih mudah, serta pembukaan pasar yang lebih luas bagi petani dan nelayan lokal.

Sementara itu, Presiden PKS Ahmad Syaikhul dalam kesempatan yang sama menyatakan bahwa aksi ini adalah bagian dari komitmen PKS untuk hadir di tengah rakyat dan memberikan solusi



nyata bagi permasalahan ekonomi serta ketahanan pangan nasional.

"Ketahanan pangan adalah salah satu pilar utama kesejahteraan bangsa. Dengan menguatkan sektor pertanian dan perikanan serta mendukung produk lokal, kita bisa membangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri. PKS akan terus berjuang agar kebijakan yang berpihak kepada petani dan nelayan dapat diwujudkan," tegas Syaikhul.

Acara ini mendapatkan respons positif dari masyarakat yang menerima paket sayuran dan ikan asin. Banyak warga yang menyatakan apresiasi terhadap langkah PKS dalam mendorong konsumsi pangan lokal dan mendukung petani serta nelayan Indonesia.

PKS berkomitmen untuk terus memperjuangkan kebijakan yang berpihak kepada rakyat, khususnya dalam sektor pertanian, perikanan, dan ketahanan pangan, guna mewujudkan kesejahteraan yang lebih merata bagi seluruh masyarakat Indonesia.



"Kami ingin mengajak masyarakat untuk lebih mencintai dan mengutamakan produk petani dan nelayan lokal. Dengan mengonsumsi pangan yang dihasilkan di dalam negeri, kita bukan hanya membantu petani dan nelayan, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan bangsa di tengah tantangan global. Ini adalah langkah nyata untuk mewujudkan Indonesia yang lebih mandiri dalam sektor pangan,"

RIYONO, S.Kel., M.Si.

Ketua DPP PKS Bidang Tani Nelayan



**Kunjungi
Kanal Resmi
Fraksi PKS DPR RI**



Website
fraksi.pks.id



Instagram
[@fraksipksdprri](https://www.instagram.com/fraksipksdprri)



Twitter
[@FPKSDPRRI](https://twitter.com/FPKSDPRRI)



Facebook
Fraksi PKS DPR RI



Youtube
PKSTV DPR RI



Tiktok
[@fraksipksdprri](https://www.tiktok.com/@fraksipksdprri)

***Nantikan
Setiap Pekan***